



Tumbuh 5,61% di Kuartal I 2026, Kadin Apresiasi Kinerja Pemerintah

Kemenkop–Kadin Indonesia Perkuat Koperasi Merah Putih untuk Rantai Pasok Pangan Nasional

Forum Bisnis Indonesia-Korea Sepakati 17 MoU Senilai 10,2 Miliar Dolar AS, Anindya Bakrie: Meningkatkan FDI hingga Lapangan Kerja

Survei Kadin Business Pulse Q1 2026, Anindya Bakrie: Efisiensi Perlu, tapi Harus Cepat Kembali ke Growth

Kadin Soroti Ketidakpastian Global, Dorong Dunia Usaha Adaptif dan Perkuat Pasar Domestik

Ekonomi Kuartal I 2026 Tumbuh 5,61%, Kadin Mengapresiasi Kinerja Pemerintah

Anindya Novyan Bakrie



Ketika dunia sedang dibayangi ketidakpastian geopolitik, perang dagang, dan lonjakan risiko energi global akibat konflik Timur Tengah, ekonomi Indonesia justru menunjukkan ketahanan yang sangat kuat. Di saat banyak negara menghadapi perlambatan pertumbuhan, tekanan inflasi, gejolak pasar keuangan, hingga ancaman resesi, Indonesia mampu mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61% pada kuartal I-2026 secara tahunan (year on year/yoy).

Menurut saya, capaian ini layak diapresiasi tinggi. Ini bukan sekadar pertumbuhan ekonomi biasa, melainkan bukti bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap solid di tengah badai global yang sangat berat. Dunia usaha melihat pemerintah berhasil menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, stabilitas harga, penciptaan lapangan kerja, dan keberlanjutan aktivitas investasi. Saya memandang keberhasilan ini tidak datang secara kebetulan. Pertumbuhan ekonomi 5,61% merupakan hasil dari kombinasi kebijakan fiskal yang agresif, percepatan belanja pemerintah

sejak awal tahun, penguatan konsumsi domestik, program sosial yang memiliki efek ekonomi besar, serta investasi yang tetap bergerak di tengah ketidakpastian global.

Yang membanggakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 tercatat sebagai salah satu yang tertinggi di antara negara-negara anggota G-20. Pada periode yang sama, ekonomi China tumbuh sekitar 5%, Singapura 4,6%, Korea Selatan 3,6%, Arab Saudi 2,8%, dan Amerika Serikat sekitar 2,7%-2,8%.

Dalam situasi global saat ini, pertumbuhan 5,61% adalah prestasi yang sangat penting. Dunia sedang menghadapi tekanan geopolitik akibat konflik Amerika Serikat dan Iran, ketidakpastian rantai pasok global, volatilitas harga minyak, serta perlambatan perdagangan dunia. Namun Indonesia mampu menjaga momentum pertumbuhan secara relatif kuat.

Saya melihat ini sebagai sinyal positif bahwa ekonomi Indonesia semakin resilien dan mulai memiliki fondasi domestik yang lebih kuat dibandingkan masa-masa sebelumnya. Jika kondisi global membaik, kenaikan laju pertumbuhan ekonomi hingga menembus 8% pada tahun 2029 bakal menjadi kenyataan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 merupakan pertumbuhan kuartal pertama tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Sementara itu, pertumbuhan belanja pemerintah sebesar 21,81% menjadi yang tertinggi dalam 25 tahun terakhir.

Menurut saya, percepatan belanja pemerintah menjadi faktor pembeda utama pada awal 2026. Pemerintah tampak sangat agresif menjalankan program prioritas nasional sejak awal tahun, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan 3 juta rumah, percepatan proyek infrastruktur, hilirisasi industri, hingga berbagai stimulus konsumsi masyarakat.

Dari perspektif dunia usaha, langkah pemerintah mempercepat belanja negara sangat tepat. Ketika dunia sedang melemah, maka mesin domestik harus diperkuat. Dan itu dilakukan pemerintah dengan cukup baik.

Belanja negara yang bergerak cepat memberikan efek berantai ke berbagai sektor ekonomi. Ketika proyek pemerintah berjalan, industri bergerak. Ketika belanja sosial meningkat, konsumsi masyarakat naik. Ketika konsumsi naik, perdagangan dan jasa ikut tumbuh. Karena itu, saya melihat pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 sangat ditopang oleh kekuatan permintaan domestik.

Data BPS menunjukkan konsumsi rumah tangga tumbuh 5,52% yoy dan tetap menjadi penopang utama ekonomi nasional dengan kontribusi lebih dari 54% terhadap PDB. Sementara investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 5,96% yoy, menunjukkan kepercayaan pelaku usaha terhadap prospek ekonomi Indonesia masih tetap terjaga.

Konsumsi pemerintah sendiri tumbuh sangat impresif sebesar 21,81% yoy. Dalam pandangan saya, ini mencerminkan keberanian pemerintah menggunakan APBN sebagai instrumen stabilisasi ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Yang juga menarik adalah mulai terlihatnya dampak pembukaan pasar ekspor baru dan meningkatnya investasi ke daerah. Dunia usaha mulai melihat adanya diversifikasi investasi yang tidak hanya terkonsentrasi pada proyek-proyek besar, tetapi juga mulai masuk ke sektor dan wilayah yang lebih luas.

Data perdagangan Indonesia memperkuat optimisme tersebut. Neraca perdagangan Maret 2026 kembali mencatat surplus sebesar US\$3,32 miliar, naik signifikan dibandingkan Februari 2026 sebesar US\$1,27 miliar. Dengan demikian, Indonesia membukukan surplus perdagangan selama 71 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

Bagi saya, ini pencapaian yang sangat penting di tengah kondisi perdagangan global yang masih lesu. Surplus perdagangan menunjukkan daya tahan sektor eksternal Indonesia masih cukup baik.

Ekspor Indonesia memang menghadapi tekanan global, tetapi struktur impor memberikan sinyal positif bagi aktivitas ekonomi domestik. Impor barang modal tumbuh 4,98% dan bahan baku penolong naik 2,15%, yang berarti aktivitas produksi dan investasi dalam negeri masih bergerak. Sebaliknya, impor barang konsumsi turun 10,81%, menandakan ekonomi mulai lebih bertumpu pada sektor produktif domestik.

Selain itu, realisasi investasi nasional pada kuartal I-2026 mencapai Rp498,8 triliun atau tumbuh 7,2% secara tahunan. Investasi tersebut setara 24,4% dari target tahunan Rp2.041,3 triliun. Hilirisasi tetap menjadi motor utama dengan kontribusi Rp147,5 triliun.

Menurut saya, hilirisasi mulai menunjukkan hasil nyata terhadap struktur ekonomi Indonesia. Investasi tidak lagi hanya berbasis eksploitasi komoditas mentah, tetapi mulai memperkuat industri pengolahan dan nilai tambah di dalam negeri.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan struktur yang cukup sehat. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh paling tinggi sebesar 13,14% yoy, diikuti transportasi dan pergudangan 8,04%, informasi dan komunikasi 7,14%, serta perdagangan besar dan eceran 6,26%.

Sementara itu, industri pengolahan tetap menjadi tulang punggung ekonomi nasional dengan kontribusi sekitar 19% terhadap PDB dan pertumbuhan sebesar 5,04%. Ini penting karena industri manufaktur masih menjadi sektor utama penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi nasional.

Secara regional, Pulau Jawa masih mendominasi ekonomi nasional dengan kontribusi lebih dari 57% terhadap PDB dan pertumbuhan 5,79%. Namun saya melihat perkembangan positif mulai muncul di luar Jawa. Bali dan Nusa Tenggara tumbuh 7,93%, sementara Sulawesi tumbuh 6,95%, terutama didorong investasi dan hilirisasi.

Merata Hingga Daerah

Dalam pandangan saya, tantangan Indonesia ke depan bukan sekadar menciptakan pertumbuhan tinggi, tetapi memastikan pertumbuhan tersebut lebih merata. Karena itu, investasi ke daerah harus terus diperkuat. Daerah tidak boleh hanya menjadi pasar, tetapi harus menjadi pusat pertumbuhan baru.

Saya juga menilai pemerintah cukup berhasil menjaga inflasi tetap terkendali di tengah gejolak global. Ini sangat penting karena konflik geopolitik dunia, terutama di Timur Tengah, telah mendorong volatilitas harga energi dan pangan internasional.

Namun Indonesia relatif mampu menjaga stabilitas harga melalui pengendalian inflasi, penguatan pasokan pangan, serta berbagai stimulus domestik. Stabilitas inflasi ini menjadi fondasi penting dalam menjaga daya beli masyarakat.

Selain pertumbuhan dan inflasi, indikator ketenagakerjaan juga menunjukkan perkembangan positif. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2026 turun menjadi 4,68%. Jumlah penduduk bekerja mencapai 147,67 juta orang, sementara jumlah pengangguran turun menjadi sekitar 7,24 juta orang.

Menurut saya, penurunan pengangguran ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi mulai benar-benar menciptakan lapangan kerja baru. Dunia usaha merasakan aktivitas ekonomi mulai meningkat di banyak sektor, terutama perdagangan, konstruksi, industri pengolahan, pertanian, transportasi, dan jasa.

Dalam konteks ini, saya juga melihat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki kontribusi ekonomi yang sangat besar. Program ini bukan hanya program sosial, tetapi juga program ekonomi rakyat berskala nasional.

Ekspansi MBG sangat luar biasa. Dari sekitar 900 dapur pada kuartal I-2025 menjadi lebih dari 26 ribu dapur pada kuartal I-2026. Produksi meningkat menjadi sekitar 60 juta porsi per hari dengan keterlibatan sekitar 1,3 juta tenaga kerja.

Putaran uang yang dihasilkan diperkirakan mencapai Rp900 miliar per hari. Belanja program yang mencapai sekitar Rp80 triliun menjadi stimulus langsung bagi ekonomi rakyat.

Saya melihat MBG menciptakan multiplier effect yang sangat kuat. Program ini menggerakkan petani, nelayan, peternak, UMKM pangan, transportasi, distribusi, logistik, hingga pekerja dapur di daerah.

Lebih dari itu, MBG membantu pemerataan ekonomi nasional karena manfaatnya langsung dirasakan hingga pelosok daerah. Dengan lebih dari 56 juta penerima manfaat, program ini menjadi salah satu instrumen pemerataan ekonomi terbesar yang pernah dijalankan pemerintah.

Karena itu saya berpandangan bahwa keberhasilan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 merupakan kombinasi dari keberanian pemerintah mempercepat belanja, menjaga konsumsi domestik, memperkuat investasi, mengendalikan inflasi, serta menjaga stabilitas sosial-ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Tentu tantangan ke depan masih besar. Risiko geopolitik belum selesai. Harga energi dunia masih berpotensi berfluktuasi. Ketidakpastian perdagangan global juga masih tinggi. Namun saya percaya Indonesia memiliki peluang besar untuk terus tumbuh lebih tinggi apabila momentum ini dijaga secara konsisten.

Dunia usaha siap terus bekerja sama dengan pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Sebab pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi yang baik bukan hanya soal angka statistik, melainkan pertumbuhan yang menciptakan pekerjaan, memperkuat UMKM, meningkatkan investasi daerah, dan menghadirkan kesejahteraan yang semakin merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR ISI

Tumbuh 5,61% di Kuartal I 2026, Kadin Apresiasi Kinerja Pemerintah	8
Kemenkop–Kadin Indonesia Perkuat Koperasi Merah Putih untuk Rantai Pasok Pangan Nasional	11
Survei Kadin Business Pulse Q1 2026, Anindya Bakrie: Efisiensi Perlu, tapi Harus Cepat Kembali ke Growth	13
Kadin Soroti Ketidakpastian Global, Dorong Dunia Usaha Adaptif dan Perkuat Pasar Domestik	15
Forum Bisnis Indonesia-Korea Sepakati 17 MoU Senilai 10,2 Miliar Dolar AS, Anindya Bakrie: Meningkatkan FDI hingga Lapangan Kerja	17
Kadin Gandeng China Perkuat Rantai Pasok Pangan	19
Bertemu Dubes Republik Cile, Kadin Fokuskan Potensi Kerja Sama Ternak Hidup untuk MBG	21
Terima GAMDI, Kadin Tegaskan Program MBG Didorong Jadi Motor Ekonomi Daerah	22
KUHP Baru Berlaku, Kadin Dorong Dunia Usaha Perkuat Kepatuhan	23
Kadin Tolak Wacana Penundaan Restitusi, Dunia Usaha Butuh Ketenangan dan Kepastian	24
Sektor Ekonomi Halal Diperkirakan Siap Tembus 8 Triliun Dolar AS, Kadin Ajak B57+ Perkuat Kolaborasi Global	25
Kadin Percepat Implementasi FTA Indonesia-EAEU, Targetkan Perdagangan Naik Dua Kali Lipat	26

DAFTAR ISI

Wujudkan Investasi Strategis, Kadin Aceh Perkuat Kemitraan Agroindustri dengan Negeri Tirai Bambu	27
Muprov VIII Kadin Papua, Anindya Bakrie Soroti Potensi SDA Papua dalam Pengembangan Energi Baru Terbarukan	28
Kadin Lampung Optimistis Ekonomi Daerah Tumbuh Lewat Transformasi Kepemimpinan Kewirausahaan	29
Kadin NTT Siap Bersinergi dengan KPP Pratama Kupang Perkuat Literasi Pajak	30
Riset yang Diadopsi Industri Masih Minim, Kadin Jatim: Dibutuhkan Pendekatan Demand-Driven Research	31
Kadin Papua Barat Perkuat Sinergi Perbankan untuk Optimalkan Penyaluran KUR	33
Kadin Jateng Gelar Halalbihalal, Dorong Sinergi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	34
Kadin Lampung Dorong Transformasi Ekonomi Lampung Selatan melalui Sinergi Dunia Usaha	35
Kadin Percepat Pembangunan Huntap untuk Penyintas Banjir Pidie Jaya, Progres Capai 75 Persen	36
Anindya Bakrie Lantik Jajaran Pengurus Kadin Bali, Dorong Pulau Dewata Jadi “Green Island” Berbasis Energi Bersih	37



Tumbuh 5,61% di Kuartal I 2026, Kadin Apresiasi Kinerja Pemerintah

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie saat menyampaikan paparannya mengenai perekonomian nasional

Jakarta – Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I 2026 yang mencapai 5,61% tak lepas dari program pemerintah yang dieksekusi dengan cukup baik. Percepatan belanja pemerintah sejak Januari, program makan bergizi gratis (MBG) yang berjalan masif hingga Rp80 triliun, pembangunan 3 juta rumah yang cukup agresif, dan sejumlah program prioritas lainnya ikut mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi. Demikian pula dengan kegiatan investasi langsung yang berjalan sejak awal tahun.

“Kami mengapresiasi kinerja pemerintah. Program pemerintah yang diterapkan sejak awal 2025 mulai menunjukkan hasil tahun ini,” ujar Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie, Selasa (05/05/2026).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61% di tengah kondisi global yang memburuk merupakan capaian yang luar biasa dan perlu diapresiasi. Kadin akan terus bekerja sama dengan pemerintah, mendukung, dan berpartisipasi penuh terhadap semua program untuk mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi dan menciptakan pemerataan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, Sabang hingga Merauke.

Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I 2026 sebesar 5,61% adalah capaian tertinggi di antara negara anggota G-20. Pada periode yang sama, ekonomi China tumbuh 5%, Singapura 4,6%, Korea Selatan 3,6%, Arab Saudi 2,8%, dan Amerika Serikat 2,8%.

“Ini adalah prestasi membanggakan,” ungkap Anindya atau Anin sapaan akrabnya.

Neraca Perdagangan dan Investasi

Anin menilai, perbaikan kinerja ekonomi nasional tidak hanya ditopang oleh belanja pemerintah dan konsumsi domestik, tetapi juga mulai ditandai oleh terbukanya pasar ekspor baru serta meningkatnya aliran investasi, termasuk dari skala menengah yang mulai menyebar ke daerah.

Upaya membuka pasar ekspor baru, meski masih pada tahap awal, sudah mulai memberikan dampak di tengah berbagai tantangan global. Pada saat yang sama, demikian Anin, arus investasi yang masuk dinilai semakin beragam, tidak hanya didominasi proyek besar, tetapi juga investasi menengah yang berpotensi menjadi penggerak ekonomi daerah.

“Belakangan ini, kita berhasil membuka pasar ekspor baru. Walaupun baru mulai, sudah terlihat dampaknya, termasuk terhadap investasi yang masuk,” ujar Anin.

Anin menambahkan, investasi yang berkembang saat ini tidak hanya berskala besar, tetapi juga mulai menyasar sektor dan wilayah yang lebih luas.

Menurut Anin, tantangan berikutnya adalah memastikan investasi tersebut terus mengalir ke daerah melalui penguatan koordinasi dan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. Hanya dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di pusat, melainkan menyebar secara lebih merata ke berbagai daerah.



Kadin memandang, jika tren pembukaan pasar ekspor dan penguatan investasi ini terus dijaga, serta didukung koordinasi yang solid antara pusat dan daerah, maka ekonomi Indonesia tidak hanya akan tumbuh lebih tinggi, tetapi juga lebih inklusif.

“Pertumbuhan tidak boleh hanya terjadi di pusat. Daerah harus menjadi sumber pertumbuhan baru,” tegas Anin.

Dana ke Daerah

“Ke depan tinggal bagaimana diskusi dengan pemerintah daerah agar investasi di daerah bisa ditingkatkan dan daerah ikut maju. Pertumbuhan ekonomi harus juga terjadi daerah,” kata Anin.

Data perdagangan Indonesia memperkuat optimisme tersebut. Data BPS menunjukkan, neraca perdagangan Indonesia pada Maret 2026 kembali mencatatkan surplus sebesar 3,32 miliar dolar AS, meningkat signifikan dibandingkan Februari 2026 yang sebesar 1,27 miliar dolar AS. Surplus ini ditopang oleh ekspor sebesar 22,53 miliar dolar AS dan impor 19,21 miliar dolar AS, sekaligus memperpanjang tren surplus menjadi 71 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

Secara kumulatif, surplus perdagangan hingga Maret 2026 mencapai 5,55 miliar dolar AS. Meski secara tahunan ekspor tercatat turun 3,1% (yoy), struktur impor menunjukkan sinyal positif bagi aktivitas ekonomi. Impor barang modal tumbuh 4,98% dan bahan baku penolong naik 2,15%, mengindikasikan peningkatan aktivitas produksi dan investasi domestik. Sebaliknya, impor barang konsumsi justru turun 10,81%, mencerminkan pergeseran ke arah penguatan sektor produktif.

Dari sisi investasi, lanjut Anin, realisasi penanaman modal pada triwulan I-2026 mencapai Rp498,8 triliun atau tumbuh 7,2% (yoy), setara 24,4% dari target tahunan Rp2.041,3 triliun. Sektor hilirisasi masih menjadi motor utama dengan kontribusi Rp147,5 triliun, menegaskan peran strategisnya dalam memperkuat struktur ekonomi nasional.

Kinerja tersebut memperlihatkan bahwa momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai ditopang oleh kombinasi yang lebih seimbang antara konsumsi domestik, ekspor yang mulai pulih, dan investasi yang semakin meluas. Dalam konteks ini, masuknya investasi menengah ke daerah dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan sekaligus mendorong pemerataan.

Ke depan, lanjut Anin, dana transfer ke daerah yang selama setahun terakhir dipangkas perlu kembali ditingkatkan perlahan. Pemda yang sudah menunjukkan kinerja yang baik perlu diberikan insentif dengan menambah dana transfer ke daerah. Dana transfer ke daerah sangat penting dalam menggerakkan perekonomian, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah.

Seperti diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS), Selasa (05/05/2026) pagi, belanja pemerintah yang melesat 21,81% dan investasi yang melaju 5,96% mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal pertama 2026 hingga 5,61%, jauh di atas perkiraan berbagai pengamat dan lembaga ekonomi, dalam dan luar negeri.

Konsumsi rumah tangga bertumbuh moderat di level 5,52%. Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp6.187,2 triliun dan atas dasar harga konstan mencapai Rp3.447,7 triliun pada kuartal I-2026.

Struktur pertumbuhan menegaskan dominasi permintaan domestik di tengah lemahnya sektor eksternal, dengan ekspor bertumbuh 0,90% yoy dan impor naik 7,18% yoy. Dari sisi lapangan usaha, sektor jasa menjadi motor utama, terutama akomodasi dan makan minum (13,14%), transportasi (8,04%), serta informasi dan komunikasi (7,14%), sementara industri pengolahan tetap menjadi kontributor terbesar PDB sekitar 19%.

Secara geografis, pertumbuhan masih didominasi Pulau Jawa yang menyumbang lebih dari separuh PDB, meski kawasan Bali-Nusa Tenggara dan Sulawesi mencatat pertumbuhan lebih tinggi. Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan resiliensi ekonomi Indonesia di awal 2026, dengan belanja pemerintah dan investasi menjadi kunci menjaga momentum pertumbuhan di tengah ketidakpastian global.

Kontribusi MBG

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), demikian Anin, muncul sebagai salah satu motor baru pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026, sekaligus instrumen strategis dalam mendorong pemerataan ekonomi di berbagai wilayah. Di tengah capaian pertumbuhan ekonomi 5,61% (yoy), program ini tercatat mengalami ekspansi luar biasa, dengan skala pelaksanaan melonjak lebih dari 2.400% secara tahunan (yoy).

Jika pada kuartal I-2025 MBG masih berada pada tahap awal dengan 900 dapur, 2,5 juta porsi per hari, dan melibatkan sekitar 45.000 pekerja, pada kuartal I-2026 program ini telah berkembang menjadi ekosistem ekonomi raksasa. Jumlah dapur meningkat menjadi 26.066 unit, produksi mencapai 60 juta porsi per hari, dan menyerap sekitar 1,3 juta tenaga kerja. Putaran uang yang dihasilkan juga melonjak tajam dari Rp37,5 miliar per hari menjadi sekitar Rp900 miliar per hari.

“Ini mencerminkan efek pengganda (multiplier effect—Red) yang sangat kuat terhadap perekonomian domestik,” jelas Anin.

Ekspansi masif ini, lanjut Anin, menjadikan MBG sebagai salah satu program dengan serapan anggaran tercepat di awal tahun 2026, dengan nilai belanja diperkirakan mencapai sekitar Rp80 triliun. Besarnya belanja tersebut langsung mengalir ke masyarakat melalui rantai pasok pangan, distribusi, logistik, hingga tenaga kerja lokal.

Dampaknya tidak hanya terasa pada peningkatan konsumsi rumah tangga, tetapi juga pada penguatan sektor riil, terutama pertanian dan konstruksi, yang mengalami peningkatan aktivitas seiring kebutuhan bahan baku dan pembangunan infrastruktur pendukung dapur MBG.

Lebih dari sekadar stimulus ekonomi jangka pendek, MBG juga memainkan peran penting dalam mendorong pemerataan ekonomi. Program ini telah menjangkau sekitar 56,13 juta penerima di seluruh provinsi, menjadikannya salah satu intervensi pemerintah dengan cakupan paling luas. Dengan distribusi yang merata hingga ke daerah, MBG membantu mengalirkan likuiditas ke wilayah-wilayah yang sebelumnya memiliki akses ekonomi terbatas, sehingga memperkecil kesenjangan antarwilayah.

Efek pemerataan ini terlihat dari penciptaan lapangan kerja yang tersebar luas, mulai dari petani, pelaku UMKM pangan, hingga pekerja dapur dan distribusi.



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie saat memberikan keterangannya mengenai perekonomian nasional kepada para jurnalis

Dengan lebih dari 1,3 juta tenaga kerja terlibat, MBG menjadi salah satu program padat karya terbesar saat ini, sekaligus memperkuat basis ekonomi lokal. Aktivitas ekonomi yang tercipta di daerah juga berkontribusi pada peningkatan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya kembali mendorong konsumsi domestik sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Di saat yang sama, dorongan dari MBG berjalan beriringan dengan peningkatan investasi nasional. Realisasi investasi pada kuartal I-2026 mencapai Rp498 triliun, tumbuh 7% yoy, dengan penyerapan tenaga kerja meningkat 19% menjadi 706.569 orang.

“Program hilirisasi yang digerakkan melalui investasi, termasuk proyek-proyek strategis yang mulai berjalan sejak awal 2026, memperkuat struktur ekonomi dari sisi produksi, sementara MBG memperkuat sisi konsumsi dan distribusi,” papar Anin.

Dengan kombinasi tersebut, kata Anin, MBG tidak hanya berfungsi sebagai program sosial, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang efektif dalam menjaga momentum pertumbuhan. Program ini memperlihatkan bagaimana belanja pemerintah yang tepat sasaran dapat menciptakan efek berantai, mendorong konsumsi, menciptakan lapangan kerja, memperkuat sektor riil, sekaligus mempercepat pemerataan ekonomi.

Keberlanjutan dan efektivitas MBG akan sangat menentukan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan.

“Dalam konteks ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian, program ini menjadi salah satu fondasi penting bagi Indonesia untuk mempertahankan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Anin.



Koperasi Desa Merah Putih di Bentangan, Kecamatan Wonosari.

Kemenkop–Kadin Indonesia Perkuat Koperasi Merah Putih untuk Rantai Pasok Pangan Nasional

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi Republik Indonesia menggandeng Kadin Indonesia meluncurkan inisiatif strategis bertajuk #SatgasProtein, sebuah program pemberdayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk memperkuat rantai pasok protein nasional sekaligus mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman bernomor 2/NKB/M.KOP/2025 dan Sperj/16/KU/III/2025 yang menegaskan sinergi pemerintah dan dunia usaha dalam membangun ekosistem koperasi pangan berbasis produksi dan distribusi protein, baik hewani maupun nabati.

Program ini berangkat dari kebutuhan memperkuat peran koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat. Kementerian Koperasi Republik Indonesia memiliki mandat menyusun kebijakan pengembangan koperasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, sementara Kadin Indonesia berfungsi sebagai jembatan antara dunia usaha dan pemerintah, khususnya dalam sektor perdagangan, industri, dan jasa.

Dalam implementasinya, ruang lingkup kerja sama mencakup penyediaan dan pertukaran data, penguatan kapasitas produksi dan distribusi protein, fasilitasi pembiayaan, peningkatan kompetensi SDM koperasi, serta penguatan kelembagaan koperasi Merah Putih. Selain itu, kedua pihak juga akan melakukan koordinasi dan sosialisasi bersama untuk memastikan efektivitas program di lapangan.



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie saat menghadiri peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Bentangan, Kecamatan Wonosari.

Secara operasional, Kemenkop dan Kadin akan melakukan survei dan verifikasi bersama terhadap koperasi yang membutuhkan pemberdayaan, sekaligus menyediakan data lokasi prioritas. Kadin, di sisi lain, akan menjalankan program pemberdayaan melalui penyediaan protein serta memperluas akses pasar dan kemitraan usaha bagi koperasi.

Kerja sama ini berlaku selama tiga tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan. Sumber pembiayaan berasal dari anggaran masing-masing pihak maupun sumber sah lainnya. Keberhasilan program akan diukur melalui sejumlah indikator, antara lain jumlah koperasi yang terdampingi, volume distribusi protein bulanan, cakupan wilayah, peningkatan pendapatan koperasi, serta kepatuhan terhadap standar mutu dan keamanan pangan seperti SNI, BPOM, dan sertifikasi halal.



Wakil Ketua Umum Bidang Peternakan Kadin Indonesia, Cecep Muhammad Wahyudin dan Wakil Ketua Umum Bidang Pertanian Kadin Indonesia, Devi Erna Rachmawati berdiskusi dalam Rapat Satgas Protein yang dilaksanakan di Menara Kadin Indonesia.

Dalam tahap awal, program difokuskan pada empat sektor utama, yakni ayam pedaging, ayam petelur, sapi perah, dan penguatan rantai pasok (supply chain). Pendekatan ini dinilai strategis mengingat tingginya kontribusi komoditas tersebut terhadap kebutuhan protein nasional.



Koperasi Desa Merah Putih yang menyediakan berbagai produk pangan, di Bentangan, Kecamatan Wonosari.

Salah satu program unggulan adalah pendampingan bisnis ayam petelur bagi koperasi desa, yang akan dimulai melalui skema pilot project sebelum direplikasi secara nasional.

Setiap koperasi akan mengelola sekitar 1.000 ekor ayam petelur dan 2.000 ekor ayam pedaging, disesuaikan dengan kapasitas desa dan kesiapan sumber daya manusia.

Pendampingan tidak hanya berfokus pada aspek teknis peternakan, tetapi juga pada pembangunan model bisnis koperasi yang berkelanjutan. Materi pendampingan mencakup penguatan mindset pengurus koperasi, manajemen usaha, pengelolaan risiko, tata kelola operasional, hingga digitalisasi pemasaran.

Dari sisi ekonomi, program ini memiliki potensi menarik. Dengan asumsi tingkat produksi rata-rata 87% dan harga telur sekitar Rp30.000 per kilogram pada tahun pertama, koperasi diproyeksikan mampu menghasilkan pendapatan sekitar Rp13,7 juta per bulan, dengan potensi peningkatan seiring pertumbuhan harga dan efisiensi usaha.

Lebih jauh, program ini diharapkan melahirkan model koperasi pangan modern yang tidak hanya produktif, tetapi juga transparan, adaptif, dan siap direplikasi secara nasional. Dalam konteks yang lebih luas, #SatgasProtein menjadi langkah konkret memperkuat ketahanan pangan berbasis ekonomi kerakyatan, sekaligus menjawab tantangan pemenuhan gizi masyarakat melalui pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan kolaborasi erat antara pemerintah dan dunia usaha, Koperasi Merah Putih diproyeksikan menjadi motor baru dalam rantai pasok protein nasional, menghubungkan produksi di tingkat desa dengan kebutuhan konsumsi masyarakat secara lebih efisien dan merata.

Survei Kadin Business Pulse Q1 2026, Anindya Bakrie: Efisiensi Perlu, tapi Harus Cepat Kembali ke Growth

Jakarta – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie, menyoroti dampak ketidakpastian global terhadap dunia usaha nasional. Hal tersebut disampaikan Anin sapaan akrabnya dalam acara Press Conference Kadin Business Pulse Q1 2026: Menavigasi Ketidakpastian – Dari Sentimen Bisnis menuju Aksi Kebijakan di Menara Kadin Indonesia, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (24/04/2026).

Anin mengatakan dinamika dan konflik di Timur Tengah telah memberikan dampak signifikan bagi banyak negara, termasuk Indonesia.

“Dampak paling terasa adalah kenaikan harga BBM yang kemudian merembet ke peningkatan biaya operasional. Namun, kondisi ini tidak diimbangi dengan kenaikan daya beli, karena likuiditas saat ini juga sangat ketat,” ujar Anin.

Menurut Anin, kondisi tersebut mendorong Kadin Indonesia untuk secara rutin melakukan survei Kadin Business Pulse setiap kuartal. Survei ini dinilai penting karena berbasis pada masukan korporasi, bukan individu, sehingga mencerminkan kondisi riil dunia usaha.

“Jawaban yang kami dapatkan berasal dari perusahaan-perusahaan yang memegang langsung aspek profit and loss. Jadi ini bukan asumsi, melainkan evidence-based (berbasis bukti),” kata Anin



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie memimpin konferensi pers bertajuk Kadin Business Pulse Q1 2026: Menavigasi Ketidakpastian – Dari Sentimen Bisnis menuju Aksi Kebijakan di Menara Kadin Indonesia, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (24/04/2026).

Anin menambahkan, di tengah perkembangan teknologi dan penggunaan data berbasis digital serta kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), pengumpulan informasi menjadi lebih komprehensif. Meski demikian, interaksi langsung dengan pelaku usaha tetap menjadi hal penting, sehingga Kadin terus aktif menjangkau daerah untuk memahami tantangan ekonomi secara nyata.

Lebih lanjut, Anin juga mengingatkan bahwa dunia usaha telah melalui berbagai krisis, seperti krisis finansial 1998, krisis global 2008, serta pandemi COVID-19 pada 2021-2022. Karena itu, pelaku usaha perlu menyiapkan model bisnis yang lebih tangguh, tidak hanya untuk bertahan, tetapi juga siap menghadapi krisis berikutnya.

“Tantangannya sekarang adalah bagaimana menyikapi situasi ini. Apakah hanya fokus pada efisiensi dengan mengencangkan ikat pinggang, atau segera kembali ke jalur pertumbuhan,” jelas Anin.

Dijelaskan Anin, berdasarkan hasil survei Kadin Business Pulse Q1 2026, mayoritas pelaku usaha memilih melakukan efisiensi secara bertahap, namun tetap berupaya secepat mungkin kembali ke strategi pertumbuhan.

“Kalau saya lihat dari sisi dunia usaha memilih untuk bisa efisiensi untuk cepat kembali kepada growth. Karena pertumbuhanlah yang memungkinkan penciptaan lapangan kerja dan menjaga perputaran ekonomi,” ujar Anin.

Anin mengingatkan bahwa dampak konflik di Timur Tengah tidak bersifat sementara. Perubahan yang terjadi berpotensi menggeser struktur rantai pasok global dalam jangka panjang.



Direktur Eksekutif Kadin Indonesia Mulya Amri dalam konferensi pers Kadin Business Pulse Q1 2026: Menavigasi Ketidakpastian – Dari Sentimen Bisnis menuju Aksi Kebijakan di Menara Kadin Indonesia, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (24/04/2026).

“Nah, tentu kita tidak mengatakan atau menafikan bahwa apa yang terjadi di Timur Tengah ini dampaknya bukan hanya satu dua bulan atau satu dua kuartal, bisa lebih. Karena ini mengubah tatanan daripada supply chain atau rantai pasok,” jelas Anin.

Anin menegaskan, Business Pulse tidak hanya menjadi cermin kondisi dunia usaha, tetapi juga berfungsi sebagai early warning system serta jembatan antara kebijakan dan implementasi di lapangan. Survei ini juga memuat pandangan dunia usaha terkait kondisi ekonomi terkini, respons terhadap gejala geopolitik dan geoekonomi, serta kebutuhan konkret dari pemerintah.

“Kadin adalah mitra strategis pemerintah, namun bukan pembuat kebijakan. Peran kami adalah menyampaikan apa yang dirasakan dan dibutuhkan pelaku usaha di lapangan, sehingga bisa menjadi pedoman dalam membaca kondisi ekonomi sekaligus memperluas ruang dialog antara dunia usaha dan negara,” terang Anin.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Kadin Indonesia Institute Mulya Amri, menjelaskan bahwa awal tahun 2026 diwarnai oleh meningkatnya ketidakpastian ekonomi global akibat dinamika geopolitik dan perubahan kebijakan antar-negara.

“Kondisi ini berdampak pada rantai pasok, fluktuasi harga komoditas, serta tekanan terhadap nilai tukar, termasuk peningkatan biaya operasional dunia usaha,” jelasnya.

Untuk itu, lanjut Mulya, survei Kadin Business Pulse Q1 2026 dilengkapi dengan pertanyaan yang lebih spesifik terkait kondisi bisnis, tantangan, serta dampak ketidakpastian global dan dinamika geopolitik terhadap pelaku usaha.

“Kami berharap hasil survei ini dapat menjadi referensi yang aktual untuk memahami apa yang sedang dialami dunia usaha saat ini,” katanya.

Lebih jauh, Direktur Insights Kadin Indonesia Institute Fakhru Fulvian menjelaskan hasil survei Kadin Business Pulse Q1 2026 menunjukkan bahwa langkah antisipatif perusahaan terhadap dampak konflik geopolitik masih didominasi strategi internal.

“Efisiensi biaya operasional menjadi langkah utama yang dipilih 33,9% responden, menandakan bahwa pelaku usaha lebih fokus menjaga margin usaha dengan menekan biaya produksi, distribusi, dan operasional di tengah kenaikan harga input dan tingginya ketidakpastian global. Strategi ini memperlihatkan bahwa prioritas utama perusahaan saat ini bukan ekspansi, melainkan mempertahankan kesehatan arus kas dan stabilitas usaha,” terangnya.

Namun demikian lanjut Fakhru, survei juga memperlihatkan bahwa 29,3% pelaku usaha belum atau tidak melakukan langkah khusus.

“Proporsi yang besar ini menunjukkan bahwa cukup banyak pelaku usaha masih cenderung bersikap wait and see, baik karena keterbatasan kapasitas untuk beradaptasi cepat, maupun karena belum adanya keyakinan mengenai strategi mitigasi yang paling tepat di tengah situasi yang terus berubah. Sikap ini mencerminkan kehati-hatian tinggi, tetapi sekaligus memperlihatkan bahwa sebagian dunia usaha masih rentan bila tekanan global berlangsung lebih lama,” pungkasnya.



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie saat memberikan keterangannya mengenai perekonomian nasional kepada para jurnalis

Kadin Soroti Ketidakpastian Global, Dorong Dunia Usaha Adaptif dan Perkuat Pasar Domestik



Foto bersama jajaran Dewan Pengurus Kadin Indonesia, para Ketua Umum Kadin Provinsi, serta para Duta Besar negara-negara sahabat dalam Kadin Economic & Diplomacy Breakfast Meeting di Lippo Mall Nusantara Jakarta Jumat (10/04/2026).

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Luar Negeri kembali menggelar Economic & Diplomacy Breakfast Meeting bertajuk “Eid al-Fitr Halal Bihahal Gathering” di Lippo Mall Nusantara Jakarta Jumat (10/04/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia James T. Riady menyoroti dinamika global yang semakin tidak menentu dan menuntut dunia usaha untuk lebih adaptif.

“Kita selalu akan menghadapi gejala-gejala yang makin hari makin lebih sering. Ini sudah menjadi suatu hal yang the new normal ya, normal yang baru ya. Jadi kita harus belajar bagaimana pintar untuk merespons dan pintar untuk menyesuaikan diri dengan situasi global yang ada,” kata James usai acara.

James menambahkan, di tengah tantangan jangka pendek, prospek Indonesia dalam jangka menengah dan panjang tetap sangat kuat, terutama dalam konteks pergeseran pusat ekonomi global dari Atlantik ke Pasifik. “Di mana di Pasifik ini berarti Amerika (Serikat), China dan juga Indonesia,” terang James.

Menurutnya, posisi geografis Indonesia menjadi keunggulan strategis dalam perdagangan internasional. “Dan (Indonesia) memiliki strategi geografik yang luar biasa. Bentangan itu dari Barat sampai Timur itu kan naik pesawat itu 7 jam ya. Jadi perdagangan internasional banyak yang harus melalui Indonesia,” jelas James.

James juga menegaskan bahwa meskipun kondisi global dalam jangka pendek masih fluktuatif, langkah pemerintah dinilai cukup tepat dalam menjaga stabilitas.

“Jadi kita melihat Indonesia ini tetap jangka panjang, jangka menengah luar biasa bagus. Jangka pendek ya kita melihat saja perkembangan di dunia seperti apa, kita menyesuaikan diri dan pemerintah telah mengambil sikap-sikap yang saya kira cukup bagus ya untuk menstabilkan situasi yang ada,” ungkapnya.

James juga menekankan pentingnya kemampuan adaptasi pelaku usaha terhadap dinamika global yang terus berkembang.

“Jadi satu hal yang penting sekali untuk perusahaan-perusahaan adalah kemampuan perusahaan-perusahaan untuk merespons terhadap situasi global yang terus berkembang secara dinamis,” kata James.

Ia juga mengingatkan bahwa tekanan global seperti inflasi dan kenaikan suku bunga menjadi tantangan yang tidak terhindarkan.

“Yaitu sudah pasti inflasi seluruh dunia ini akan naik. Sudah pasti suku bunga rendah sudah menjadi sulit,” ujarnya.

Dalam situasi tersebut, ia mendorong dunia usaha untuk mengoptimalkan sektor yang lebih tahan terhadap gejala, terutama pasar domestik.

“Dan karena itulah harus mencari peluang-peluang yang anti-inflasi, yang anti-siklikal berarti ya pasar domestik. Jadi pasar domestik itu harus dikembangkan, konsumsi domestik itu harus dikembangkan,” jelasnya.

Ia menilai sejumlah program pemerintah yang berfokus pada konsumsi domestik merupakan langkah strategis. “Dan beberapa inisiatif Presiden itu sangat-sangat penting. Program MBG (Makan Bergizi Gratis) umpamanya itu kan sangat penting karena adalah domestic consumption. Perumahan umpamanya itu juga sangat-sangat penting sekali kan. Pariwisata ini juga dalam negeri semua. Jadi ini beberapa inisiatif dari pemerintah dan saya kira yang sangat-sangat bagus,” pungkasnya.

Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia, James T. Riady saat memberikan sambutan dalam Economic & Diplomacy Breakfast Meeting di Lippo Mall Nusantara Jakarta Jumat (10/04/2026).



Hadir dalam acara tersebut WKU Bidang Diplomas Multilateral Kadin Indonesia Andi Anzhar Cakra Wijaya, WKU Bidang Pengembangan Infrastruktur Strategis dan Pembangunan Pedesaan serta Transmigrasi Kadin Indonesia Thomas Jusman, WKU Bidang Pemasaran, Promosi, Inovasi dan Pengembangan Produk UMKM Kadin Indonesia Rifda Ammarina, WKU Bidang Antar Lembaga dan Pemerintahan Daerah Kadin Indonesia Junaidi Elvis, jajaran Ketua Komite Bilateral Kadin Indonesia dan jajaran Ketua Komite Tetap Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia.

Hadir pula Ketua Umum (Ketum) Kadin Provinsi Aceh Muhammad Iqbal Piyeung, Ketum Kadin Provinsi Sumatra Barat Buchari Bachter, Ketum Kadin Provinsi Bangka Belitung Ritchie Glen Yapranadi dan Ketum Kadin Provinsi Sulawesi Tengah M. Nur Rahmatu.



Sesi diskusi Economic & Diplomacy Breakfast Meeting di Lippo Mall Nusantara Jakarta Jumat (10/04/2026).

April 01, 2026 | Seoul, Korea



Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto (kiri) menyaksikan penandatanganan MoU antara Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie (dua dari kiri) dan Korea Chamber of Commerce and Industry (KCCI) dalam Indonesia-Korea Business Forum, di Seoul (1/4/2026).

Forum Bisnis Indonesia-Korea Sepakati 17 MoU Senilai 10,2 Miliar Dolar AS, Anindya Bakrie: Meningkatkan FDI hingga Lapangan Kerja

Seoul, Korea Selatan – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Seoul dan Korea Chamber of Commerce and Industry (KCCI) menyelenggarakan agenda Indonesia-Korea Business Forum bertajuk “Partnership for Resilient Growth” pada Rabu (01/04/2026) di Shilla Hotel, Seoul.

Dalam forum itu disepakati 17 Nota Kesepahaman (MoU) antara Indonesia dan Korea dengan nilai investasi mencapai 10,2 miliar dolar AS. Penandatanganan MoU disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto yang hadir mewakili Presiden RI Prabowo Subianto.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menegaskan bahwa Republik Korea merupakan mitra yang sangat penting bagi Indonesia, kemitraan ini ditandai dengan nilai perdagangan kedua negara yang mencapai lebih dari 18 Miliar Dolar AS pada tahun 2025 serta realisasi investasi dengan total 28,1 Miliar Dolar AS dalam 4 tahun terakhir.



Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie memberikan sambutan dalam Indonesia-Korea Business Forum bertajuk “Partnership for Resilient Growth” pada Rabu (01/04/2026) di Shilla Hotel, Seoul.

“Dan ini suatu potensi untuk meningkatkan foreign direct investment, menciptakan lapangan kerja, dan tentunya meningkatkan juga perdagangan yang bisa membawa devisa,” ungkap Anin.

Anin juga menyinggung perkembangan industri kreatif sebagai salah satu contoh konkret kerja sama, termasuk meningkatnya popularitas budaya Korea seperti drama dan musik (K-pop), di samping kolaborasi di sektor industrialisasi, ketahanan pangan, dan energi.

“Untuk yang suka Korean drama, Korean pop, itu juga salah satu contoh fokusnya di industri kreatif. Selain tentunya di bidang industrialisasi, ketahanan pangan, ketahanan juga energi, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah di Indonesia, dan benar-benar makin banyak lagi,” tambah Anin.

Anin berharap, di tengah ketidakpastian global saat ini, kedua negara tetap mampu menjaga optimisme dan memperkuat kerja sama jangka panjang.

“Mudah-mudahan di tengah dunia yang tidak pasti pada saat ini, kita masih mencoba untuk mencari titik terang supaya jangka panjang Indonesia tetap maju, masyarakatnya juga tetap sejahtera, dan bahkan makin sejahtera,” pungkaskan Anin.



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie (lima dari kanan) berfoto bersama Executive Director of Global Green Growth Institute, Sang-Hyup Kim (lima dari kiri) dan jajaran delegasi Kadin Indonesia, di Seoul, pada Kamis (2/4/2026).

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia mendorong pertumbuhan inklusif, transformasi industri, dan keterlibatan global yang lebih kuat” ujar Anin, saapan akrabnya.

Lebih lanjut, Anin mengungkapkan bahwa kerja sama ekonomi Indonesia-Korea memiliki potensi besar untuk meningkatkan foreign direct investment (FDI) hingga devisa negara.

Forum bisnis yang membuka peluang kerja sama senilai 10,2 miliar dolar AS antara Indonesia dan Korea ini dituangkan dalam 17 nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang mencakup sektor energi, manufaktur industri, hilirisasi, serta ekonomi digital, yaitu:

- 1 MoU antara Kadin dan Korea Chamber of Commerce and Industry (KCCI)
- 2 MoU antara Danantara dan Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND)
- 3 MoU antara Danantara dan Korea Eximbank
- 4 MoU antara PLN IP dan LXI tentang studi bersama potensi pengembangan proyek pembangkit energi baru dan terbarukan di Indonesia
- 5 MoU antara Pertamina Hulu Energi (PHE) dan POSCO tentang amandemen kedua untuk studi bersama energi baru dan terbarukan
- 6 Pengumuman LS MnM tentang ekspansi rantai nilai material baterai melalui akuisisi mayoritas strategis atas PT Teluk Metal Industry
- 7 MMoU antara Sinarmas Land (PT Bumi Serpong Damai) dan Daewoo tentang kemitraan pengembangan lahan residensial dan komersial di BSD City
- 8 MoU antara PT Pertamina Hulu Energi (PHE) dan ExxonMobil tentang kerja sama lintas batas carbon capture and storage (CCS)
- 9 MoU antara PT Fortuna Integritas Mandiri dan Dunamu tentang penguatan ekosistem aset digital Indonesia
- 10 MoU antara Kadin Jakarta dan KCCI Incheon
- 11 Lol Ecopro tentang investasi pada rantai nilai terintegrasi material baterai sekunder
- 12 Pengumuman Sambu tentang investasi pabrik manufaktur tas
- 13 Pengumuman Dorco tentang investasi pabrik manufaktur pisau cukur
- 14 Pengumuman E3 Mobility tentang transportasi ramah lingkungan
- 15 Lol POSCO tentang ekspansi fase 2 PT Krakatau POSCO
- 16 MoU antara PT Pertamina dan POSCO tentang teknologi rendah karbon
- 17 Lol KCC Glass tentang pengadaan katoda tembaga

Fokus utama forum bisnis ini meliputi identifikasi proyek-proyek strategis, penguatan kesiapan proyek, peningkatan kepastian investasi, serta percepatan industrialisasi berkelanjutan yang sejalan dengan prioritas pembangunan nasional kedua negara.

Selain itu, forum yang digelar sebagai bagian dari rangkaian acara kunjungan kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Republik Korea ini bertujuan untuk mendorong agar para pengusaha di kedua negara memanfaatkan Indonesia-Korea Economic Partnership Agreement (IK-CEPA), serta kemitraan komprehensif dan strategis kedua negara.

Hadir dalam forum tersebut Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM RI sekaligus CEO Danantara Rosan P. Roeslani, Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir, Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Organisasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa, dan WKUK Koordinator Bidang Pangan Kadin Indonesia Mulyadi Jayabaya.



Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan sambutan dalam Indonesia-Korea Business Forum, di Seoul (1/4/2026).



Sekretaris Jenderal Kadin Indonesia Komite Korea, Joohan Lee (kiri) dan Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) (dua dari kiri) dalam sesi dialog Indonesia-Korea Business Forum, di Seoul (1/4/2026).

Kadin Gandeng China Perkuat Rantai Pasok Pangan



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie memberikan plakat kepada President The China Egg Industry Wang Zhongqiang dalam acara bertajuk “Strategic Orchestration of China’s Agrotechnology Ecosystem for Strengthening the Supply Chain of MBG Sumatra Corridor” serta penyerahan Plakat oleh (tengah), Ketua Umum Kadin Provinsi Aceh Muhammad Iqbal Piyeung di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (21/04/2026).

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Kadin Provinsi Aceh menerima audiensi *The China Egg Industry Chain Business Delegation* dalam agenda bertajuk “Strategic Orchestration of China’s Agrotechnology Ecosystem for Strengthening the Supply Chain of MBG Sumatra Corridor” di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (21/04/2026).

Delegasi China yang dipimpin Presiden Beijing Egg Association Wang Zhongqiang, diterima langsung oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie bersama Ketua Umum Kadin Provinsi Aceh Muhammad Iqbal Piyeung.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menilai Kadin Provinsi Aceh sebagai contoh baik bagi Kadin daerah dalam mengoptimalkan peran strategisnya. Menurutnya, keberhasilan Kadin daerah tidak hanya berdampak lokal, tetapi juga mampu menjawab peluang di tingkat nasional.

“Kami sangat senang melihat Kadin provinsi seperti Aceh yang mampu berkembang dengan baik. Bahkan, Kadin daerah juga bisa berkontribusi dalam menjawab peluang nasional, termasuk menjalin kemitraan dengan mitra internasional besar seperti China,” ujar Anin sapaan akrabnya.

Anin menegaskan bahwa hubungan perdagangan Indonesia-China selama ini sangat signifikan. China masih menjadi tujuan ekspor nonmigas terbesar Indonesia dengan nilai lebih dari 65 miliar dolar AS per tahun. Di sisi lain, hampir 40 persen impor nonmigas Indonesia juga berasal dari China, terutama untuk mesin dan barang manufaktur yang menopang industrialisasi nasional.

Namun, Anin menekankan bahwa kerja sama kali ini menghadirkan terobosan baru, khususnya dalam sektor ketahanan pangan.

“Ini merupakan peluang besar di bidang ketahanan pangan, terutama seiring program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas pemerintah. Program ini akan melibatkan 30.000 dapur (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi/SPPG), dan Kadin berencana berkontribusi pada 1.000 dapur dengan sumber daya sendiri,” jelas Anin.

Lebih lanjut, Anin mengungkapkan bahwa kebutuhan nasional untuk program MBG mencapai lebih dari 700 juta butir telur per bulan atau sekitar 24 juta butir per hari. Khusus di Aceh, dengan sekitar 700 dapur, kebutuhan diperkirakan mencapai 600 ribu butir telur per hari.

"Ini menunjukkan skala kebutuhan yang sangat besar, termasuk kebutuhan protein lainnya seperti daging ayam. Karena itu, kolaborasi dengan mitra internasional menjadi sangat penting," tutur Anin.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Aceh Muhammad Iqbal Piyeung menegaskan bahwa pertemuan ini merupakan langkah konkret menuju realisasi investasi di sektor peternakan dan pengolahan pangan di Aceh.



Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie (tengah) bersama dengan Ketua Umum Kadin Provinsi Aceh Muhammad Iqbal Piyeung (kanan) dan President The China Egg Industry Wang Zhongqiang (kiri) dalam acara bertajuk "Strategic Orchestration of China's Agrotechnology Ecosystem for Strengthening the Supply Chain of MBG Sumatra Corridor" di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (21/04/2026).

Iqbal mengungkapkan adanya komitmen investasi untuk pembangunan fasilitas pengelolaan susu serta proyek Mega Layer Farm terintegrasi di Aceh dengan nilai mencapai 450 juta RMB.

"Kepercayaan ini membawa kita pada tahap realisasi investasi nyata. Kami melihat masa depan di mana teknologi modern dapat bersinergi dengan ketersediaan lahan dan sumber daya di Aceh," pungkas Iqbal.

Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua (WKU) Umum Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Sarana/Prasarana Kadin Indonesia M. Azis Syamsuddin, WKU Bidang Organisasi Kadin Indonesia Taufan Eko Nugroho Rotorasiko, WKU Bidang Peternakan Kadin Indonesia Mohammed Cevy Abdullah dan Kepala Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Gotong Royong Kadin Indonesia Chandra Tirta Wijaya.



Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Sarana/Prasarana Kadin Indonesia M. Azis Syamsuddin (kiri) bersama Ketua Umum Kadin Provinsi Aceh Muhammad Iqbal Piyeung (kanan) pada saat menerima audiensi The China Egg Industry Business Delegation di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (21/04/2026).

Bertemu Dubes Republik Cile, Kadin Fokuskan Potensi Kerja Sama Ternak Hidup untuk MBG



Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya N. Bakrie (kanan) memberikan cinderamata kepada Duta Besar (Dubes) Republik Cile untuk Indonesia, Mario Ignacio Artaza Loyola (kiri) usai pertemuan di Menara Kadin Indonesia pada Kamis (23/04/2026).

Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menerima audiensi Duta Besar (Dubes) Republik Cile untuk Indonesia Mario Ignacio Artaza Loyola di Menara Kadin Indonesia pada Kamis (23/04/2026). Pertemuan ini membahas penguatan kerja sama perdagangan dan investasi antar-ke dua negara.

Anindya atau Anin sapaan akrabnya, menilai Republik Cile sebagai mitra strategis, terutama karena telah menjadi anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

Anin menyebut, pengalaman Republik Cile dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam proses akses ke OECD, khususnya dalam meningkatkan investasi.

“(Republik) Cile ini menarik sekali karena (Republik) Cile itu telah masuk OECD. Artinya, manfaatnya (tentu) investasi, disana (OECD) banyak negara-negara yang mempercayakan standar investasi yang lebih tinggi dan ini kita bisa mendapatkan investasi lebih yang kita butuhkan, yang artinya untuk lapangan kerja dan lain-lain,” ujar Anin usai pertemuan.

Anin menambahkan, Indonesia dan Republik Cile juga sama-sama tergabung dalam Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) serta telah memiliki perjanjian dagang Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (IC-CEPA) yang perlu terus dioptimalkan.

“Kita mempunyai Comprehensive Economic Partnership Agreement dari 2017 yang kita ingin tingkatkan. Kita banyak ekspor komponen otomotif, lalu juga alas kaki, tapi juga kita mendapatkan banyak produk-produk agrikultur, termasuk lagi berupaya untuk sapi, untuk bisa live cattle (ternak hidup), untuk bisa membantu susu dan juga protein untuk MBG (makan bergizi gratis),” terang Anin.

Sementara itu, Dubes Republik Cile untuk Indonesia Mario Ignacio Artaza Loyola menyampaikan optimisme terhadap peningkatan hubungan ekonomi kedua negara, baik dari sisi perdagangan maupun investasi.

“Kami ingin memperkuat kerja sama yang sudah ada dan mendorong perdagangan yang lebih aktif ke depan,” ujarnya.

la juga menyoroti peluang investasi yang semakin terbuka, termasuk di sektor industri dan hilirisasi.

“Ada ruang besar untuk investasi dari Cile ke Indonesia dan sebaliknya. Proses hilirisasi juga sangat menarik untuk dikembangkan bersama,” kata Mario.

Menurutnya, di tengah persaingan global yang semakin ketat, kolaborasi kedua negara menjadi kunci untuk membuka peluang baru di berbagai sektor.

“Kita hidup di masa di mana kita perlu bekerja sama, untuk mengidentifikasi peluang baru di bidang perdagangan, investasi, dan pengetahuan,” pungkasnya.

Terima GAMDI, Kadin Tegaskan Program MBG Didorong Jadi Motor Ekonomi Daerah

Jakarta – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menerima audiensi Gabungan Mitra Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Indonesia (GAMDI) di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (29/04/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Anin sapaan akrabnya menegaskan bahwa kehadiran GAMDI mencerminkan semangat kolaborasi lintas pelaku usaha untuk menyukseskan program MBG yang diinisiasi pemerintah.

“Ini gabungan mitra dapur MBG Indonesia. Dari namanya saja sudah terlihat bahwa tujuannya bukan maju sendiri-sendiri, tetapi maju bersama-sama,” ujar Anin.

Anin menilai program MBG merupakan inisiatif strategis yang tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas generasi mendatang, tetapi juga berpotensi memperkuat ketahanan pangan serta menggerakkan perekonomian daerah. Kadin mendukung penuh implementasi program tersebut karena mampu mendorong aktivitas ekonomi hingga ke tingkat kabupaten dan kota, bukan hanya terpusat di wilayah tertentu.

“Yang membuat kami semangat, program ini (MBG) tidak mengambil alih pengusaha lokal, tetapi justru menggerakkan ekonomi sampai ke daerah,” kata Anin.

Dijelaskan Anin, GAMDI terdiri dari berbagai pelaku usaha dengan rantai pasok yang lengkap, mulai dari penyedia bahan pangan seperti sayur dan protein, penyedia peralatan, hingga pihak yang memiliki keahlian di bidang properti, sertifikasi, dan hukum. Keberagaman tersebut dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif dan tepat sasaran, termasuk dalam pengelolaan anggaran.

“Jadi memang ini kita mesti berkolaborasi untuk Indonesia Incorporated, tapi kita fokus justru untuk mengembangkan ekonomian daerah dan UMKM. Jadi itulah intinya. Teknologi bisa dari mana-mana, mitra bisa dari mana-mana, tapi fokusnya untuk mengembangkan perekonomian di daerah menuju kepada perekonomian nasional yang tangguh,” terang Anin.



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie berfoto bersama jajaran Gabungan Mitra Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (GAMDI) di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (29/04/2026).

Sementara itu, Ketua Umum GAMDI Riyad mengungkapkan bahwa organisasi yang dipimpinnya merupakan kepanjangan tangan dari program prioritas Kadin dalam mendukung pemerintah.

“Perlu digarisbawahi bahwa GAMDI, Gabungan Mitra Dapur Makanan Bergizi Indonesia itu lahir karena adanya program utama Kadin, ya dalam hal ini ikut memprioritaskan mendukung program pemerintah,” kata Riyad.

Menanggapi pertanyaan mengenai kekhawatiran program ini hanya menjadi “ladang bisnis”, Riyad memberikan klasifikasi mengenai fungsi kemitraan dalam ekosistem MBG. Menurutnya, GAMDI hadir untuk menampung aspirasi berbagai pemangku kepentingan (stakeholder).

“Fungsi GAMDI ini adalah menampung, menampung aspirasi dari stakeholder. Jadi stakeholder BGN (Badan Gizi Nasional) itu bukan hanya dapur tapi banyak hal. Banyak hal di sini ada yang kita sebut juga pelaku-pelaku perekonomian ya, pelaku-pelaku perekonomian yang kalau dapur sendiri itu mendapatkan insentif,” pungkas Riyad.

KUHP Baru Berlaku, Kadin Dorong Dunia Usaha Perkuat Kepatuhan



Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Sarana/Prasarana M. Azis Syamsuddin (kanan) bersama Tenaga Ahli Komisi III DPR RI sekaligus dosen Pascasarjana Universitas Borobudur Afdhal Mahatta (kiri) sebagai narasumber utama dalam Executive Brief, yang digelar di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (08/04/2026).

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Kadin Indonesia Institute (KII) menggelar Executive Brief bertajuk “Memahami Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru: Implikasi bagi Tata Kelola dan Kepatuhan Dunia Usaha” di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (08/04/2026).

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Sarana/Prasarana Kadin Indonesia M. Azis Syamsuddin, mengatakan kegiatan ini bertujuan menyelaraskan pandangan antara dunia hukum dan dunia usaha guna mendorong kemajuan industri.

“Dalam rangka bagaimana menyelaraskan pandangan-pandangan dunia hukum untuk kemajuan dunia usaha dan industri,” ujar Azis.

Forum tersebut menghadirkan Tenaga Ahli Komisi III DPR RI sekaligus dosen Pascasarjana Universitas Borobudur Afdhal Mahatta sebagai narasumber utama Forum ini membahas pentingnya sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mulai berlaku sejak 2 Januari 2026 dan dinilai memiliki keterkaitan erat dengan dunia usaha, termasuk sektor konstruksi.

Sementara itu, Afdhal Mahatta menyampaikan bahwa pemberlakuan KUHP baru membawa implikasi signifikan terhadap sektor bisnis, khususnya terkait pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana.

“Tentu kita tahu bahwa KUHP baru sudah berlaku sejak 2 Januari 2026 dan berimplikasi kepada sektor dunia usaha maupun bisnis,” kata Afdhal.

Afdhal menjelaskan, KUHP baru juga membawa perubahan paradigma dalam sistem pidana. Jika sebelumnya KUHP lama belum mengatur korporasi sebagai subjek pidana dan lebih menitikberatkan pada pendekatan retributif, kini pendekatan tersebut bergeser.

“Kalau di KUHP lama keadilannya retributif, fokus pada pidana dan pemenjaraan. Sedangkan KUHP baru bersifat rehabilitatif dan restoratif,” ujarnya.

Afdhal menambahkan, diskusi dalam forum tersebut menghasilkan berbagai masukan dari peserta dan diharapkan menjadi awal dari sosialisasi yang lebih luas.

“Kami berharap ini bukan akhir, tetapi awal untuk melakukan sosialisasi dan diskusi lanjutan agar perekonomian berjalan lancar dan korporasi dapat menjalankan fungsinya dengan baik,” pungkasnya.

Kadin Tolak Wacana Penundaan Restitusi, Dunia Usaha Butuh Ketenangan dan Kepastian



Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Saleh Husin mewakili Kadin Indonesia dalam memberikan respons terhadap pernyataan Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun dalam dialog di sebuah stasiun TV nasional, Rabu (08/04/2026).

Jakarta - Dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu dan para pelaku usaha harus menjaga keberlanjutan usaha untuk mempertahankan karyawan, membuka lapangan kerja baru, dan mendorong pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemerintah perlu memberikan ketenangan dan kepastian berusaha. Dalam tekanan ekonomi global yang dipicu perang tarif dan konflik geopolitik, mempertahankan pekerja yang ada bukan masalah mudah, apalagi membuka lapangan kerja baru.

"Para pelaku usaha yang tergabung di Kadin Indonesia mendukung sepenuhnya semua program presiden, di antaranya job creation atau penciptaan lapangan kerja. Ini semua bisa berjalan jika ada ketenangan dan kepastian berusaha," kata Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Saleh Husin, Kamis (09/04/2026). Pernyataan ini merupakan respons Kadin terhadap pernyataan Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun dalam dialog di sebuah stasiun TV nasional, Rabu (08/04/2026).

Kadin menilai, dalam situasi global yang masih bergejolak, dunia usaha saat ini sedang berjuang untuk bertahan, bahkan sekadar menjaga keberlangsungan usaha. Karena itu, pelaku usaha justru membutuhkan kepastian kebijakan, bukan tambahan ketidakpastian yang dapat mengganggu iklim investasi.

"Dunia usaha harusnya diberikan ketenangan dan kepastian berusaha, bukan justru dihadapkan pada kebijakan yang berpotensi mempersulit iklim usaha, khususnya di sektor manufaktur yang mempekerjakan berjuta-juta tenaga kerja," demikian Saleh.

Kadin menegaskan bahwa restitusi pajak merupakan hak dunia usaha atas kelebihan pembayaran pajak yang telah disetorkan kepada negara. Penundaan atau penghentian restitusi dinilai berpotensi menimbulkan polemik baru serta memicu keraguan investor terhadap kepastian hukum dan kebijakan di Indonesia. "Jangan sampai muncul kebijakan yang justru menciptakan ketidakpastian dan berdampak pada minat investasi," tegas mantan Menteri Perindustrian itu.

Lebih jauh, Saleh mengingatkan bahwa kondisi ekonomi saat ini tidak dalam situasi normal. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, legislatif, yudikatif, dunia usaha, maupun akademisi perlu bersinergi menghadapi tekanan global yang berdampak langsung pada perekonomian domestik.

Sebelumnya, Misbakhun menyatakan penundaan restitusi dapat meningkatkan penerimaan negara hingga Rp500 triliun dan menjadi bantalan fiskal di tengah lonjakan harga energi global. Namun, dunia usaha, kata Saleh, menilai stabilitas kebijakan dan kepastian berusaha adalah faktor utama untuk menjaga kepercayaan investor dan keberlanjutan ekonomi nasional. "Jangan sampai, pengusaha bersikap tetap wait and see untuk membuka usaha baru," pungkasnya.*

Sektor Ekonomi Halal Diperkirakan Siap Tembus 8 Triliun Dolar AS, Kadin Ajak B57+ Perkuat Kolaborasi Global



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie (tengah) bersama dengan Chairman B57+ Asia-Pacific Regional Chapter, M. Arsjad Rasjid P.M. (kanan) dan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya (kiri) dalam acara bertajuk Strengthening Islamic Economic Synergy: From Ukhuwah to Global Economic Partnership yang digelar di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Rabu (22/04/2026).

Jakarta – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyampaikan dukungan terhadap penguatan kerja sama ekonomi Islam di kawasan Asia Pasifik dalam acara Halalbihalal B57+ Asia-Pacific Regional Chapter bertajuk Strengthening Islamic Economic Synergy: From Ukhuwah to Global Economic Partnership yang digelar di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Rabu (22/04/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Anin sapaan akrabnya mengucapkan selamat kepada Arsjad Rasjid atas penunjukannya sebagai Chairman B57+ Asia-Pacific Regional Chapter. Menurutnya, hal ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Indonesia karena cakupan Asia Pasifik tidak hanya meliputi Asia Tenggara, tetapi seluruh kawasan Asia Pasifik.

“Ini adalah kebanggaan bagi Indonesia. Asia Pasifik bukan hanya Indonesia atau Asia Tenggara, tetapi seluruh kawasan, dan memiliki wakil yang tepat seperti Pak Arsyad tentu patut kita dukung dan banggakan,” ujar Anin.

Anin menyoroti besarnya potensi ekonomi Islam secara global. Berdasarkan data yang disampaikan, dalam tiga hingga empat tahun ke depan nilai sektor halal diperkirakan mencapai lebih dari 3 triliun dolar AS, sementara aset keuangan syariah berada di kisaran 5 hingga 8 triliun dolar AS.

Lebih lanjut, Anin menegaskan bahwa Indonesia saat ini membutuhkan narasi pertumbuhan ekonomi yang kuat. Sejalan dengan target pemerintah untuk mencapai pertumbuhan hingga 8 persen, Indonesia juga menghadapi tantangan global yang kompleks sehingga membutuhkan mitra strategis yang kuat dan saling mendukung.

“Indonesia saat ini membutuhkan growth story yang kuat. Presiden menargetkan pertumbuhan bertahap menuju 8 persen, dan dalam situasi global yang penuh tantangan, kita membutuhkan mitra yang banyak, yang reliable, dan memiliki semangat untuk maju bersama,” kata Anin.

“Menurut Anin, B57+ merupakan kelompok strategis yang tidak hanya beranggotakan negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), tetapi juga terhubung dengan Islamic Chamber of Commerce and Development, sehingga memiliki potensi besar sebagai mitra dalam pengembangan industri halal.

“Ini adalah reliable dan prospective partner untuk mengembangkan industri halal dan Islamic finance. Indonesia sebagai negara muslim terbesar membutuhkan kesejahteraan yang bisa dirasakan hingga ke pelosok daerah,” terang Anin.

Sementara itu, Chairman B57+ Asia-Pacific Regional Chapter Arsjad Rasjid mengatakan bahwa ekonomi halal kini menjadi “bahasa bisnis” yang bersifat universal. Artinya, sektor ini tidak hanya ditujukan bagi komunitas Muslim, tetapi juga diterima secara luas karena menawarkan nilai transparansi dan jaminan kualitas.

Namun, ia mengingatkan, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya terkonversi menjadi manfaat ekonomi. Salah satu tantangan utama adalah belum kuatnya konektivitas antarnegara, khususnya di antara anggota OKI dan mitra strategisnya.

“Kita melihat ini terjadi di seluruh dunia, di sektor pariwisata, supply chain, hingga keuangan syariah yang berkembang pesat di berbagai negara. Ekonomi halal adalah bahasa bisnis yang semakin universal inklusif, tumbuh, dan relevan bagi semua,” pungkas Arsjad yang juga merupakan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia.

Hadir dalam acara tersebut Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Teuku Riefky Harsya dan Wakil Ketua Umum Bidang Riset dan Teknologi Kadin Indonesia Ilham Akbar Habibie.

Kadin Percepat Implementasi FTA Indonesia-EAEU, Targetkan Perdagangan Naik Dua Kali Lipat



Deputy Minister of Economic Development of The Russian Federation Vladimir Ilichev (dua dari kiri) memberikan cenderamata kepada Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan dan Perjanjian Luar Negeri Kadin Indonesia, Pahala Mansury (dua dari kanan) didampingi oleh Ketua Komite Bilateral Rusia-Belarusia Kadin Indonesia Didit Ratam (kanan) dalam acara Russia-Indonesia Workshop on Eurasian Economic Union (EAEU)-Indonesia FTA, di Menara Kadin Indonesia, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (10/04/2026).

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menggelar Russia-Indonesia Workshop on Eurasian Economic Union (EAEU)-Indonesia Free Trade Agreement (FTA) in Practice: Rules, Procedures and Tips for Businesses, di Menara Kadin Indonesia, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (10/04/2026).

Kegiatan ini menghadirkan Deputy Minister of Economic Development of the Russian Federation Vladimir Ilichev untuk membahas implementasi perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA) yang telah ditandatangani Indonesia pada akhir 2025.

Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan dan Perjanjian Luar Negeri Kadin Indonesia Pahala Mansury mengatakan, workshop ini menjadi langkah konkret untuk mendorong pemanfaatan perjanjian tersebut oleh pelaku usaha nasional.

“Indonesia sudah menandatangani sebuah perjanjian FTA dengan anggota-anggota Eurasian Economic Community dan diharapkan perdagangan bisa meningkat sampai dengan 2 kali lipat dalam waktu 3 tahun,” ujar Pahala.

Ia menyebutkan, nilai perdagangan Indonesia dengan negara-negara EAEU (Armenia, Belarusia, Kazakstan, Kirgistan, dan Rusia) saat ini berada di kisaran 5 miliar dolar AS.

Dengan adanya pengurangan tarif serta hambatan non-tarif, peningkatan perdagangan dinilai sangat memungkinkan dalam beberapa tahun ke depan.

Pahala menjelaskan terdapat tiga sektor utama yang berpotensi menjadi motor peningkatan perdagangan, yakni komoditas pangan, energi dan hilirisasi mineral, serta industri padat karya.

“Ada 3 sektor (yaitu) food related commodities seperti CPO, gandum, fertilizer. Sektor energi termasuk hilirisasi mineral, serta labor intensive industry seperti tekstil, garment, machinery dan electronics,” katanya.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam implementasi kerja sama tersebut, terutama pada sistem pembayaran dan infrastruktur keuangan antar-negara.

Sebagai solusi, Pahala menilai perkembangan teknologi finansial dapat dimanfaatkan untuk menjembatani hambatan tersebut. “Fintech seperti blockchain, digital asset, crypto bisa menjadi salah satu solusi,” katanya.

Selain itu, penguatan infrastruktur rantai pasok seperti logistik, pengiriman, dan penyimpanan juga dinilai penting untuk memastikan potensi kerja sama dapat terealisasi secara optimal.

“Sementara itu, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (PPI) Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI Djatmiko Bris Witjaksono yang hadir mewakili Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti menyampaikan bahwa posisi Indonesia dalam nilai perdagangan dengan EAEU masih berada di bawah beberapa negara ASEAN.

“Indonesia saat ini berada pada posisi ketiga mitra dagang terbesar EAEU di ASEAN,” ujarnya.

Ia menambahkan, dari sisi investasi, Indonesia juga masih tertinggal dibandingkan Tailan dan Vietnam dalam menarik aliran investasi dari kawasan tersebut.

“Tailan dan Vietnam masih memimpin kawasan dibandingkan Indonesia,” katanya.

“Meski demikian, ia menilai perjanjian perdagangan bebas Indonesia-EAEU merupakan platform strategis untuk meningkatkan kemitraan ekonomi kedua kawasan, didukung oleh pasar domestik Indonesia yang besar, pertumbuhan kelas menengah, serta komitmen terhadap pengembangan industri dan reformasi regulasi.

“Ke depan, Indonesia siap untuk semakin memperkuat perannya dan memperdalam kerja sama dengan EAEU, dengan tujuan menjadi mitra strategis utama di ASEAN melalui peningkatan perdagangan,” tutupnya.

Hadir dalam acara tersebut WKU Bidang Pertanian Kadin Indonesia Devi Erna Rachmawati, WKU Bidang Kerja Sama Investasi dengan Pemerintah Daerah Kadin Indonesia Zulnahr Usman dan Ketua Komite Bilateral Rusia-Belarusia Kadin Indonesia Didit Ratam.

KADIN DAERAH

Wujudkan Investasi Strategis, Kadin Aceh Perkuat Kemitraan Agroindustri dengan Negeri Tirai Bambu



Kunjungan delegasi Kadin Provinsi Aceh didampingi Direktur Eksekutif Kadin Indonesia di China

Lanzhou, China – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Aceh melakukan langkah progresif dalam mendorong realisasi investasi sektor strategis melalui kunjungan ke sejumlah kawasan industri unggulan di Kota Lanzhou dan Kota Xi'an, China pada 30 Maret-4 April 2026.

Kunjungan tersebut mencakup industri pengolahan susu modern di kota Lanzhou, industri pengolahan jus buah, serta peternakan ayam terpadu berteknologi tinggi di Kota Xi'an. Kunjungan tersebut juga melihat peluang kolaborasi investasi, transfer teknologi, serta penguatan rantai pasok agroindustri.

Ketua Umum Kadin Provinsi Aceh Muhammad Iqbal Piyeung mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut, pihak China memaparkan sistem produksi modern berbasis efisiensi dan teknologi, sementara Kadin Provinsi Aceh menawarkan potensi hilirisasi sumber daya alam yang terintegrasi dan berkelanjutan.

"Inisiatif ini juga didorong oleh kebutuhan riil di Aceh yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan pasokan sejumlah komoditas strategis, seperti daging ayam, telur, dan susu, baik untuk mendukung program nasional maupun memenuhi kebutuhan masyarakat," kata Iqbal.

Iqbal menilai bahwa penguatan sektor produksi dalam negeri menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan daerah. Kunjungan ini lanjut Iqbal, tidak berhenti pada tahap peninjauan.

Sebagai tindak lanjut, sebanyak 25 delegasi bisnis dan investasi dari China dijadwalkan melakukan kunjungan balasan ke Indonesia pada pekan terakhir April 2026. Rombongan tersebut akan disambut oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie di Jakarta sebelum melanjutkan agenda ke Aceh.

"Diplomasi ekonomi melalui kunjungan timbal balik ini merupakan langkah penting untuk mempercepat realisasi investasi," lanjut Iqbal.

Proses tersebut kata Iqbal menjadi bagian dari pematangan menuju pembangunan industri strategis di Aceh, khususnya pabrik susu berteknologi modern dan peternakan ayam terpadu.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Kadin Provinsi Aceh Teuku Jailani mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sektor produktif sebagai fondasi kebangkitan ekonomi daerah.

"Penguatan sektor tersebut menjadi kunci dalam menciptakan lapangan kerja, menekan pengangguran, serta membangun kemandirian ekonomi Aceh secara berkelanjutan," tutup Teuku.

Hadir dalam kunjungan tersebut Direktur Eksekutif Kadin Indonesia Pipin Moh. Saeful Arifin, Wakil Ketua Umum Bidang Investasi Kadin Provinsi Aceh TAF Haikal dan Perwakilan Kadin Provinsi Aceh untuk Malaysia, China dan India, Melissa Tan.

Muprov VIII Kadin Papua, Anindya Bakrie Soroti Potensi SDA Papua dalam Pengembangan Energi Baru Terbarukan



Foto bersama Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie (lima dari kiri), Gubernur Provinsi Papua Mathius D. Fakhiri (lima dari kanan) dan Ketua Umum Kadin Provinsi Papua Jacklaena Joku (empat dari kiri) dalam acara Musyawarah Provinsi (Muprov) VIII Kadin Provinsi Papua di Aula Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Sabtu (11/04/2026).

Jayapura – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Papua menggelar Musyawarah Provinsi (Muprov) VIII dengan mengusung tema “Bersatu, Bertumbuh, dan Berdaya Saing” di Aula Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Papua, pada Sabtu (11/04/2026).

Dalam Muprov tersebut Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie resmi melantik dan mengukuhkan Jacklaena Joku sebagai Ketua Umum Kadin Provinsi Papua periode 2026-2031 menggantikan Ronald Antonio.

Dalam sambutannya, Anindya atau Anin sapaan akrabnya menilai Papua memiliki keunggulan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari sektor pertambangan hingga hasil hutan dan kelautan namun belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal.

“Potensi tersebut tidak hanya bertumpu pada komoditas seperti emas dan tembaga, tetapi juga mencakup sektor kelautan dan perikanan yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” ujar Anin.

Menurut Anin, Papua juga dinilai memiliki peluang besar dalam pengembangan energi baru terbarukan, khususnya tenaga surya dan energi air, mengingat kondisi geografis yang mendukung pemanfaatan energi bersih.

Papua, lanjut Anin, memiliki potensi dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pemanfaatan lahan pertanian yang luas serta pengembangan komoditas lokal.

Di sisi lain, letak geografis Papua yang strategis di kawasan timur Indonesia menjadikannya berpotensi sebagai pintu gerbang perdagangan menuju kawasan Pasifik.

“Untuk itu penguatan infrastruktur dan efisiensi logistik menjadi kunci dalam mengoptimalkan seluruh potensi tersebut agar dapat terintegrasi dengan baik,” ujar Anin.

Anin meyakini Papua mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif dan merata dengan dukungan infrastruktur dan logistik.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Papua yang turut hadir Mathius D. Fakhiri menegaskan bahwa setiap investasi yang masuk ke Papua harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Papua membutuhkan investasi yang berdampak, bukan sekadar mengambil keuntungan tanpa kontribusi nyata bagi daerah,” katanya.

Mathius berharap Kadin Papua terus menjadi mitra strategis pemerintah, memperkuat pemberdayaan UMKM, khususnya pelaku usaha orang asli Papua, serta membangun ekosistem ekonomi yang sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan.

“Dengan semangat bersatu, bertumbuh, dan berdaya saing, kita optimistis Papua akan terus bergerak menuju daerah yang maju, mandiri, dan sejahtera,” pungkask.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Taufan Eko Nugroho.

Kadin Lampung Optimistis Ekonomi Daerah Tumbuh Lewat Transformasi Kepemimpinan Kewirausahaan



Foto bersama Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Hukum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Lampung Romi Junanto Utama dan para pembicara Lampung Post Executive Forum yang berlangsung di Hotel Emersia, Bandar Lampung pada Selasa (14/04/2026).

Bandar Lampung – Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Hukum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Lampung Romi Junanto Utama, menyampaikan optimisme tinggi terhadap masa depan perekonomian Lampung. Ia menilai perubahan gaya kepemimpinan daerah dari birokratis menuju pola entrepreneur menjadi kunci utama kemajuan daerah.

Romi menyampaikan pandangan tersebut dalam ajang Lampung Post Executive Forum yang berlangsung di Hotel Emersia, Bandar Lampung pada Selasa (14/04/2026).

Dalam forum tersebut, Romi yang hadir mewakili Ketua Umum Kadin Provinsi Lampung Muhammad Kadafi, mengulas faktor yang selama ini menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menjelaskan bahwa sejarah dan kultur Lampung menempatkan wilayah ini sebagai penopang sektor pertanian ketika pulau Jawa mengalami keterbatasan lahan.

Namun, ia menilai potensi besar tersebut tidak berjalan seiring dengan pola kepemimpinan sebelumnya.

“Sejak awal berdiri, para pemimpin mengelola Lampung dengan pola pikir birokratis. Banyak pejabat menjalankan tugas tanpa dorongan inovasi dan kedekatan dengan daerah,” ujar Romi.

Romi menegaskan bahwa kondisi tersebut kini berubah. Ia melihat kepemimpinan saat ini mengedepankan pendekatan proaktif dan kolaboratif, sehingga membuka ruang besar bagi percepatan pembangunan ekonomi.

“Inilah momentum bagi ekonomi Lampung untuk berkembang. Kepemimpinan sekarang mendorong kinerja nyata, bukan sekadar menjalankan kewajiban. Karena itu, tidak ada alasan bagi Lampung untuk tidak maju,” pungkasnya.

Kadin NTT Siap Bersinergi dengan KPP Pratama Kupang Perkuat Literasi Pajak



Pertemuan silaturahmi yang dihadiri oleh Ketua Umum Kadin NTT, Bobby Lianto (tiga dari kanan) dan Kepala KPP Pratama Kupang Jehuda Bil Jonas Zacharias (empat dari kanan) di Kantor Kadin Provinsi NTT, Kupang, NTT, pada Selasa (14/04/2026).

Kupang – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyatakan kesiapan untuk memperkuat sinergi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kupang dalam meningkatkan literasi perpajakan di kalangan pelaku usaha.

Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan silaturahmi antara Ketua Umum Kadin NTT Bobby Lianto dan Kepala KPP Pratama Kupang Jehuda Bil Jonas Zacharias di Kantor Kadin Provinsi NTT, Kupang, NTT, pada Selasa (14/04/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Bobby Lianto menegaskan bahwa Kadin memiliki peran strategis sebagai wadah berbagai asosiasi pengusaha untuk menjangkau pelaku usaha lintas sektor.

“Kami siap menjadi jembatan sosialisasi perpajakan kepada para pelaku usaha. Harapannya, mereka tidak hanya memahami aturan, tetapi juga mampu menjalankannya dengan benar,” kata Bobby.

Bobby juga menyoroti masih rendahnya pemahaman sebagian pengusaha terhadap regulasi perpajakan. Ia menilai, pembinaan yang berkelanjutan sangat diperlukan agar pelaku usaha tidak terjebak pada pelanggaran yang berujung sanksi.

“Komunikasi dan pembinaan harus terus dilakukan. Dengan begitu, para pengusaha bisa belajar, memahami, dan akhirnya patuh terhadap kewajiban perpajakan,” tutur Bobby.

Sementara itu, Kepala KPP Pratama Kupang Jehuda Bil Jonas Zacharias menekankan pentingnya kemitraan strategis antara otoritas pajak dan organisasi pengusaha. Ia menilai, perkembangan sistem perpajakan yang semakin modern, termasuk implementasi Coretax, menuntut pelaku usaha untuk terus meningkatkan pemahaman mereka.

“Kami berharap Kadin dapat menjadi mitra dalam menyosialisasikan berbagai ketentuan perpajakan. Sistem yang semakin canggih membutuhkan kesiapan dan pemahaman yang baik dari para wajib pajak,” pungkasnya.

Hadir dalam agenda tersebut Wakil Ketua Umum Bidang Perpajakan Kadin Provinsi NTT Ferry Vincentsius dan Direktur Eksekutif Kadin Provinsi NTT Mercy Siubelan.

Riset yang Diadopsi Industri Masih Minim, Kadin Jatim: Dibutuhkan Pendekatan Demand-Driven Research



Ketua Umum Kadin Provinsi Jawa Timur, Adik Dwi Putranto dalam acara Dialog Strategis Direktorat Riset dan Inovasi (DRI) Week Universitas Airlangga bertajuk "Dari Riset ke Dampak: Sinergi Inovasi dan Industri untuk Transformasi Jawa Timur" di Kampus Universitas Airlangga Surabaya pada Selasa (14/04/2026).

Surabaya – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Jawa Timur (Jatim) Adik Dwi Putranto, menegaskan bahwa adopsi riset oleh industri dinilai sangat minim, padahal untuk mendorong transformasi ekonomi di Jatim membutuhkan sinergi yang kuat antara dunia riset dan industri.

Hal ini disampaikan Adik dalam acara Dialog Strategis Direktorat Riset dan Inovasi (DRI) Week Universitas Airlangga bertajuk "Dari Riset ke Dampak: Sinergi Inovasi dan Industri untuk Transformasi Jawa Timur" di Kampus Universitas Airlangga Surabaya pada Selasa (14/04/2026).

Adik mengungkapkan bahwa secara makro, posisi Jatim dalam perekonomian nasional tergolong sangat strategis. Pada 2025, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi Jatim mencapai sekitar Rp3.403 triliun dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,33 persen. Jatim juga menjadi salah satu kontributor utama terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Dari sisi struktur ekonomi, lanjut Adik, sektor industri pengolahan menyumbang sekitar 31 persen, sementara konsumsi rumah tangga mendominasi hingga 60 persen. Selain itu, sektor transportasi dan logistik menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi, yakni di atas 9 persen, menandakan semakin kuatnya peran Jatim sebagai pusat distribusi.

"Peran strategis Jawa Timur semakin terlihat sebagai hub manufaktur dan logistik di kawasan Indonesia Timur, sekaligus menjadi basis utama ekspor nasional. Dengan fondasi tersebut, Jawa Timur dinilai telah memiliki kekuatan skala ekonomi yang solid," kata Adik.

Namun Adik mengungkapkan bahwa ada tantangan yang belum terselesaikan, yaitu meningkatkan kelas ekonomi melalui inovasi yang berdampak pada terciptanya efisiensi di berbagai sektor. Padahal peningkatan efisiensi sebesar 1 persen saja diperkirakan mampu memberikan dampak ekonomi hingga puluhan triliun rupiah.

"Masih terdapat persoalan mendasar yang menghambat optimalisasi potensi tersebut, yakni kesenjangan antara riset dan industri. Meskipun kapasitas riset terus meningkat, banyak hasil riset yang berhenti pada tahap publikasi dan belum diimplementasikan secara luas. Keterlibatan riset dalam proses industri juga masih minim, sehingga adopsi hasil penelitian menjadi rendah," ujar Adik.

Selain itu kata Adik, belum adanya mekanisme hilirisasi yang kuat membuat hasil riset sulit diterjemahkan menjadi produk atau solusi yang bernilai ekonomi. Kondisi ini menyebabkan ketimpangan, di mana Indonesia, termasuk Jatim, kuat dalam menghasilkan output riset, namun lemah dalam menciptakan dampak ekonomi nyata.

"Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara akademisi, peneliti, pelaku industri, dan pemerintah agar inovasi yang dihasilkan benar-benar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ujar Adik.

Adik menegaskan, transformasi riset di Jatim harus mulai diarahkan pada perubahan paradigma yang lebih relevan dengan kebutuhan industri. Pendekatan lama yang bersifat *supply-driven*, di mana akademisi menentukan topik riset, dinilai sudah tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan ekonomi saat ini.

"Diperlukan pergeseran menuju pendekatan *demand-driven research*, yakni riset yang berbasis pada kebutuhan nyata industri," kata Adik.

Dalam paradigma baru ini, lanjut Adik, pelaku industri memiliki peran lebih besar dalam menentukan arah dan kebutuhan riset. Sementara itu, Kadin mengambil posisi strategis sebagai agregator kebutuhan industri sekaligus jembatan penghubung antara dunia kampus dan sektor industri.

“Kadin juga berperan sebagai fasilitator dalam proses implementasi hasil riset agar dapat diadopsi secara nyata,” terang Adik.

Sejalan dengan perubahan tersebut kata Adik, disusun agenda riset strategis yang berfokus pada tujuh prioritas utama. Pertama, inovasi produk untuk meningkatkan nilai tambah industri pengolahan. Kedua, inovasi proses produksi guna mendorong efisiensi dan produktivitas. Ketiga, inovasi pemasaran yang menekankan pada penguatan digitalisasi dan penetrasi pasar global.

Keempat, pemanfaatan teknologi dan kecerdasan buatan (AI) lanjut Adik, menjadi pilar penting dalam pengambilan keputusan berbasis data. Kelima, aspek keberlanjutan dan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) juga menjadi perhatian utama sebagai syarat untuk mengakses pasar global.

Keenam, penguatan tata kelola dan regulasi diharapkan mampu menjadi enabler pertumbuhan ekonomi. Terakhir, pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan kompetensi difokuskan pada upaya link and match antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri.

Adik menambahkan, untuk memastikan agenda tersebut berjalan efektif, disusun kerangka implementasi yang konkret. Langkah pertama adalah pembentukan Industrial Problem Bank, yaitu basis data yang memuat kebutuhan dan permasalahan industri secara terstruktur. Kedua, pembentukan Joint Research Task Force yang melibatkan kolaborasi antara Kadin, perguruan tinggi seperti Universitas Airlangga (Unair), serta lembaga riset seperti Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Langkah ketiga lanjut Adik adalah pelaksanaan proyek percontohan hilirisasi riset, yang mencakup komersialisasi hasil penelitian, program inkubasi, serta adopsi oleh industri. Proses ini juga didukung oleh pendanaan hibah riset terapan dari pemerintah, sehingga hasil riset tidak berhenti pada tataran akademis, melainkan mampu memberikan dampak ekonomi nyata.

“Dengan pendekatan ini, Kadin berharap tercipta ekosistem inovasi yang lebih terintegrasi, di mana riset tidak hanya menghasilkan publikasi, tetapi juga solusi konkret yang mampu mendorong pertumbuhan industri dan daya saing ekonomi Jawa Timur,” pungkask Adik.



Ketua Umum Kadin Provinsi Jawa Timur, Adik Dwi Putranto saat menjadi pembicara dalam Dialog Strategis Direktorat Riset dan Inovasi (DRI) Week Universitas Airlangga di Surabaya pada Selasa (14/04/2026).

Kadin Papua Barat Perkuat Sinergi Perbankan untuk Optimalkan Penyaluran KUR

Manokwari – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Papua Barat menggelar sosialisasi bertajuk “Sinergi Kadin & Perbankan dalam Optimalisasi Penyaluran KUR di Papua Barat” yang berlangsung di Billy Cafe, Manokwari, Papua Barat pada Rabu (15/04/2026).

Dalam sambutannya, Ketua Umum Kadin Provinsi Papua Barat Suriyati Faisal, menegaskan bahwa program KUR (Kredit Usaha Rakyat) memiliki posisi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Program ini kata Suriyati dinilai menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam memperkuat sektor UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat.

“Penyaluran KUR bukan hanya soal pembiayaan, tetapi menjadi bagian dari upaya besar untuk menggerakkan ekonomi daerah. UMKM adalah fondasi ekonomi kita, termasuk di Manokwari dan Papua Barat secara umum,” ujar Suriyati.

Suriyati menjelaskan bahwa Papua Barat memiliki potensi ekonomi yang besar, baik dari sektor perdagangan, pertanian, maupun usaha kreatif. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya berkembang optimal karena keterbatasan akses terhadap permodalan dan rendahnya literasi keuangan masyarakat.

Menurut Suriyati, masih banyak pelaku usaha, khususnya UMKM dan generasi milenial Papua, yang memiliki ide dan kemampuan, tetapi belum mampu mengembangkan usaha karena terkendala modal.

“Kami melihat banyak anak-anak muda Papua, khususnya di Papua Barat, yang sebenarnya punya potensi besar. Mereka punya kreativitas, punya semangat, tetapi sering terhambat di akses pembiayaan,” katanya.

Karena itu lanjut Suriyati, melalui kegiatan sosialisasi ini, Kadin Provinsi Papua Barat berupaya memberikan pemahaman menyeluruh mengenai program KUR, mulai dari persyaratan, mekanisme pengajuan, hingga manfaat yang bisa diperoleh pelaku usaha.

“Kami ingin pelaku UMKM tahu secara jelas bagaimana cara mengakses KUR, apa saja syaratnya, dan bagaimana memanfaatkannya untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan,” ujarnya.



Ketua Umum Kadin Provinsi Papua Barat, Suriyati Faisal (lima dari kanan) dan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat Sarce M. Meidodga (lima dari kiri) berfoto bersama para pembicara dalam acara sosialisasi “Sinergi Kadin & Perbankan dalam Optimalisasi Penyaluran KUR di Papua Barat” di Billy Cafe, Manokwari, Papua Barat pada Rabu (15/04/2026).

Suriyati juga menekankan pentingnya perubahan pola pikir di kalangan generasi muda Papua. Ia mendorong agar generasi milenial tidak hanya berorientasi menjadi pencari kerja, tetapi juga berani menjadi pencipta lapangan kerja.

“Jangan hanya berharap menjadi aparatur sipil negara atau tenaga honorer. Saat ini peluang di sektor tersebut semakin terbatas, apalagi dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran,” katanya.

Ia menambahkan, kondisi tersebut seharusnya menjadi momentum bagi generasi muda untuk beralih ke dunia usaha dan memanfaatkan berbagai fasilitas yang telah disediakan pemerintah, termasuk program KUR.

“Justru ini kesempatan untuk menjadi pelopor wirausaha. Fasilitas sudah disediakan oleh pemerintah, tinggal bagaimana kita memanfaatkannya secara bertanggung jawab,” ucapnya.

Lebih lanjut, Suriyati menegaskan komitmen Kadin Papua Barat untuk terus berperan sebagai mitra strategis pemerintah dan penghubung antara dunia usaha dengan lembaga keuangan. Menurutnya, keberadaan Kadin tidak hanya sebatas organisasi, tetapi juga sebagai jembatan yang memastikan pelaku usaha mendapatkan akses pembiayaan yang tepat.

“Kami ingin memastikan bahwa program-program seperti KUR benar-benar tepat sasaran dan dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama putra-putri asli Papua,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat Sarce M. Meidodga, menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif Kadin Papua Barat yang dinilai aktif mendorong penguatan sektor UMKM.

Menurut dia, kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi pelaku usaha, terutama dalam hal permodalan dan pengembangan kapasitas usaha.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan dukungan dari Kadin dan perbankan agar pelaku UMKM tidak hanya mendapatkan akses modal, tetapi juga pendampingan usaha,” pungkasnya.

Kadin Jateng Gelar Halalbihalal, Dorong Sinergi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem



Ketua Umum Kadin Provinsi Jateng Harry Nuryanto Soediro memberikan sambutan dalam acara "Halalbihalal dan Silaturahmi Keluarga Besar Kadin Jawa Tengah" yang berlangsung di Patra Semarang Hotel & Convention, Semarang, Jateng, Kamis (16/04/2026).

Semarang – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menggelar acara Halalbihalal dan Silaturahmi dengan mengusung tema "Silaturahmi Kadin Bersama Menuju Jateng Makin Maju" yang berlangsung di Patra Semarang Hotel & Convention, Semarang, Jateng, pada Kamis (16/04/2026).

Ketua Umum Kadin Provinsi Jateng Harry Nuryanto Soediro dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan Halalbihalal ini menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi antar-anggota sekaligus memperkuat kebersamaan dalam membangun dunia usaha di Jateng.

"Halalbihalal ini sebagai ajang untuk bersilaturahmi keluarga besar Kadin (Provinsi) Jawa Tengah serta menjadi wujud syukur atas perjalanan Kadin (Provinsi) Jawa Tengah selama ini," ujar Harry.

Lebih lanjut, Harry menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jateng atas berbagai dukungan dan kebijakan yang terus mendorong pertumbuhan dunia usaha.

"Kadin (Provinsi) Jawa Tengah berkomitmen untuk terus bersinergi dan mendukung program-program pemerintah, termasuk dalam upaya pengentasan kemiskinan di wilayah Jawa Tengah," tutur Harry.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Jateng Ahmad Lutfi mengajak Kadin untuk berperan aktif dan berkolaborasi dalam mengatasi kemiskinan ekstrem di Jateng.

"Kadin kami minta untuk tampil di depan. Memerangi kemiskinan itu tidak bisa hanya sandang, pangan, papan. Ada kesehatan, ada pendidikan. Kita harus keroyok bersama," tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa penanganan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi.

"Rumah kita perbaiki, perut kita isi, kesehatannya kita tangani, anaknya kita sekolahkan. Semua harus jalan bareng," tambahnya.

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan sejumlah program strategis Pemerintah Provinsi Jateng, di antaranya renovasi 17.000 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada tahun 2025, serta program Dokter Spesialis Keliling (Dokter Speling) yang menghadirkan layanan kesehatan langsung ke desa-desa.

Ia juga mendorong optimalisasi program Corporate Social Responsibility (CSR) oleh Kadin dan para pelaku usaha untuk membantu masyarakat miskin ekstrem di seluruh kabupaten/kota di Jateng.

"CSR-nya digunakan untuk membantu yang miskin ekstrem di wilayah kita. Kalau tidak kita keroyok ramai-ramai, Jawa Tengah akan begitu-begitu saja," pungkasnya.

Kadin Lampung Dorong Transformasi Ekonomi Lampung Selatan melalui Sinergi Dunia Usaha



Foto bersama pengurus Kadin Provinsi Lampung dan Kadin Kabupaten Lampung Selatan dalam acara "Halalbihalal Pengurus Kadin Lampung Selatan" yang digelar di Aula Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Yasba Kalianda, Lampung Selatan, Lampung, Sabtu (18/04/2026).

Lampung Selatan – Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Organisasi dan Hukum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Lampung Romi Junanto Utama, menegaskan pentingnya peran Kadin dalam mendukung pembangunan Kabupaten Lampung Selatan, khususnya dalam mendorong transformasi ekonomi dan penguatan sektor usaha.

Pernyataan tersebut disampaikan Romi saat hadir mewakili Ketua Umum Kadin Provinsi Lampung Muhammad Kadafi dalam acara Halalbihalal Kadin Kabupaten Lampung Selatan yang digelar di Aula Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Yasba Kalianda, Lampung Selatan, Lampung, Sabtu (18/04/2026).

"Peran Kadin sangat strategis dalam mendorong transformasi ekonomi daerah. Kami ingin memastikan dunia usaha di Lampung Selatan semakin kuat, adaptif, dan mampu bersaing, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah," ujar Romi.

Sementara itu, Ketua Kadin Kabupaten Lampung Selatan Budiman Dabo, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menilai momentum Halalbihalal ini sebagai ajang mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam pembangunan daerah.

"Saya mengucapkan minal aidin wal faizin. Momentum ini kami manfaatkan untuk mengajak seluruh pelaku usaha bersama-sama membangun Kabupaten Lampung Selatan. Kadin harus ambil bagian dalam perjalanan pembangunan hingga 2030," ujarnya.

Lebih lanjut, Ketua Dewan Penasihat Kadin Kabupaten Lampung Selatan Fahrurrozi, menyampaikan optimisme terhadap masa depan pembangunan daerah melalui sinergi yang kuat antara pemerintah dan Kadin.

"Saya yakin dengan kolaborasi yang kuat, Kabupaten Lampung Selatan dapat terus berkembang menjadi daerah yang maju dan berdaya saing," kata Fahrurrozi.

Lebih jauh, Asisten III Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Edy Fernandi, mengajak seluruh elemen dunia usaha untuk terlibat aktif dalam mendukung program pembangunan daerah lima tahun ke depan. Ia menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan.

Selain itu, ia juga menyoroti peran pelaku usaha, termasuk UMKM, agar turut bertanggung jawab terhadap kebersihan dan keberlanjutan lingkungan usaha. Pemerintah daerah, lanjutnya, membuka peluang kolaborasi dengan Kadin, baik dalam pengembangan sumber daya manusia, pelatihan, maupun sektor strategis lainnya.

"Kami membuka ruang kerja sama seluas-luasnya. Selama tujuannya sama untuk membangun, mari kita berjalan bersama. Kadin dapat menjadi penggerak sekaligus penghubung antara dunia usaha, pendidikan, dan investor," pungkas Edy.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut WKU Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana Kadin Provinsi Lampung Ajie Munawwar dan WKU Bidang Kelautan dan Perikanan Kadin Provinsi Lampung Edy Wibowo.

Kadin Percepat Pembangunan Huntap untuk Penyintas Banjir Pidie Jaya, Progres Capai 75 Persen



Pidie Jaya – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Kadin Provinsi Aceh meninjau sekaligus mempercepat pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat penyintas banjir di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Minggu (19/04/2026).

Dalam peninjauan tersebut, sejumlah unit hunian telah menunjukkan progres signifikan. Di Desa Muka Blang, Kecamatan Panteraja, pembangunan telah mencapai sekitar 75 persen. Sementara itu, pembangunan hunian di Gampong Meunasah Lhok, Kecamatan Meureudu, telah rampung 100 persen dan siap dimanfaatkan oleh masyarakat penerima.

Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Sarana/Prasarana Kadin Indonesia M. Azis Syamsuddin yang hadir mewakili Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menilai capaian progres tersebut merupakan hasil dari kerja sama dan monitoring yang solid antara Kadin Indonesia dan Kadin Provinsi Aceh. "Ke depan, program ini diharapkan dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. Ini bukan janji, tapi akan kami upayakan. Mohon doanya," kata Azis.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Provinsi Aceh Muhammad Iqbal Piyeung, menegaskan bahwa capaian ini menjadi bukti nyata keseriusan dunia usaha dalam memastikan bantuan benar-benar dirasakan masyarakat. "Apa yang kita lihat hari ini bukan lagi rencana, melainkan progres nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," kata Iqbal.

Peninjauan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) untuk masyarakat penyintas banjir di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh yang dihadiri oleh Ketua Umum Kadin Provinsi Aceh Muhammad Iqbal Piyeung, Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Sarana/Prasarana Kadin Indonesia M. Azis Syamsuddin, serta WKU Bidang Organisasi Kadin Indonesia Taufan Eko Nugroho Rotorasiko, pada Minggu (19/04/2026).

Iqbal menambahkan, Kadin akan terus mendorong agar program tersebut memberikan dampak yang lebih luas. "Kami ingin memastikan setiap bantuan tidak hanya selesai dibangun, tetapi juga mampu menghadirkan harapan baru serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat," pungkas Iqbal.

Lebih lanjut, mewakili masyarakat penerima manfaat, Tgk. Rahmadi, menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Kadin Indonesia dan Kadin (Provinsi) Aceh atas bantuan ini. Rumah ini sangat berarti bagi warga kami. Kami juga berharap ke depan masih ada perhatian bagi masyarakat lain yang belum mendapatkan bantuan," ujarnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut WKU Bidang Organisasi Kadin Indonesia Taufan Eko Nugroho Rotorasiko, Direktur Eksekutif Kadin Indonesia Pipin Moh. Saeful Arifin dan Direktur Eksekutif Kadin Provinsi Aceh, Teuku Jailani.

Anindya Bakrie Lantik Jajaran Pengurus Kadin Bali, Dorong Pulau Dewata Jadi “Green Island” Berbasis Energi Bersih



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie berfoto bersama jajaran pengurus Kadin Provinsi Bali periode 2025-2030, pada Sabtu (25/04/2026) di Art Center, Denpasar, Bali

Denpasar - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie melantik dan mengukuhkan kembali Made Ariandi sebagai Ketua Umum Kadin Provinsi Bali beserta jajaran pengurus Kadin Provinsi Bali periode 2025-2030 yang berlangsung di Art Center, Denpasar, Bali pada Sabtu (25/04/2026).

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie dalam sambutannya, menekankan pentingnya menjaga citra Bali, terutama dalam pemberitaan di media, baik nasional maupun internasional. Menurut Anin, sapaan akrabnya, informasi yang tersebar di ruang publik memiliki dampak besar terhadap persepsi wisatawan.

"Pemberitaan kecil bisa menjadi besar. Isu terkait peta wisata, kenyamanan, hingga keamanan harus dijaga bersama. Kadin Indonesia akan turut menyuarakan pentingnya menjaga kualitas informasi, termasuk berkoordinasi dengan pemerintah," ujar Anin.

Lebih lanjut, Anin menyoroti perlunya perhatian khususnya terhadap sektor pariwisata di tengah indikasi penurunan wisatawan domestik, yang diduga dipengaruhi kenaikan harga tiket pesawat. Namun demikian, pergerakan wisatawan melalui jalur darat dinilai masih cukup stabil.

Anin juga mengapresiasi langkah pemerintah Provinsi Bali dalam mendorong diversifikasi ekonomi, tidak hanya bergantung pada pariwisata, tetapi juga mengembangkan sektor pertanian dan ekonomi hijau. Anin menyebut Bali memiliki potensi menjadi "green island" atau pulau berbasis energi bersih. "Konsep net zero island ini sangat relevan. Program waste to energy, kendaraan listrik, hingga kebijakan fiskal yang mendukung energi bersih menunjukkan Bali sangat progresif," kata Anin.

Menurut Anin, kekuatan pariwisata Bali harus tetap dijaga sebagai sektor unggulan yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional.

"Pariwisata adalah ekspor yang tidak perlu dikirim ke luar negeri, karena asetnya ada di sini," terang Anin.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Provinsi Bali I Made Ariandi, menegaskan bahwa tantangan ke depan semakin kompleks sehingga dibutuhkan semangat kolaborasi yang lebih kuat.

Menurutnya, Kadin Provinsi Bali kini telah menghimpun hampir seluruh pemangku kepentingan ekonomi dalam satu wadah, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, infrastruktur, kelistrikan, hingga ekonomi digital dan energi terbarukan.

"Kondisi semakin berat, maka semangat harus semakin tinggi. Seluruh pelaku ekonomi sudah tergabung di Kadin, ini menjadi kekuatan besar untuk menghadapi tantangan," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa persaingan Bali tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga global, dengan destinasi seperti Vietnam, Kamboja, Tailan, hingga UEA.

"Bali tidak hanya bersaing dengan daerah lain di Indonesia, tetapi dengan destinasi dunia. Namun Bali memiliki keunggulan dari sisi budaya, keramahan, dan energi positif yang tidak dimiliki daerah lain," tuturnya.

Lebih lanjut, Gubernur Provinsi Bali I Wayan Koster, menyampaikan harapannya agar Kadin dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat konektivitas dan mendorong pemulihan sektor pariwisata, khususnya wisatawan domestik.

Ia mengakui adanya penurunan kunjungan domestik sekitar 20 persen secara kumulatif hingga April 2026, yang berkaitan dengan kenaikan biaya transportasi udara. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta untuk mencari solusi yang berkelanjutan.

"Kami berharap ada dukungan dari berbagai pihak untuk mempercepat pemulihan, termasuk memperkuat konektivitas dan aksesibilitas menuju Bali," pungkasnya. Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Taufan Eko Nugroho Rotorasiko.



National Seminar on Indonesia Accession to the OECD
and Launch of Indonesia Private Sector Playbook

Indonesia OECD Accession and Private Sector Implications



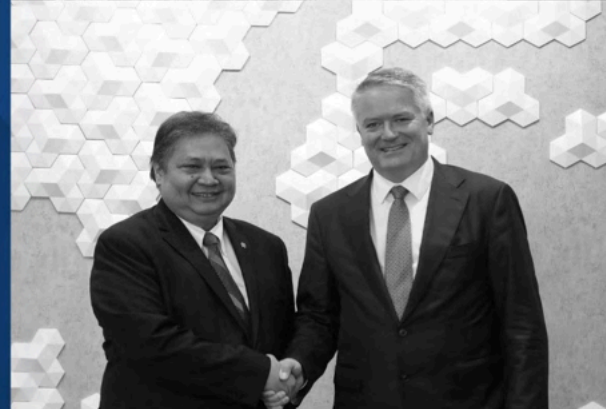
Tuesday, 21 April 2026
14.30 arrival for 15.00-16.30



Gran Meliá Jakarta, Jimbaran Room
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X0, Setia Budi,
South Jakarta City, Jakarta 12950



Register here:
bit.ly/SeminarNasionalOECD



For more information, contact:

Aisyah Rachmawati (+62 811-1911-2045) | Dian Suralaga (+62 816-1895-853) | Shafa Anargya (+62 813-2208-7989)

ESG Governance KADIN-GAPPS International Awards

An international recognition platform for excellence in ESG governance and ESG project implementation.

Organized by KADIN Indonesia, GAPPS, and ISA, in collaboration with KATADATA Green, the program promotes accountability, transparency, and long-term value creation through ESG excellence.

AWARD CATEGORIES

Governance of ESG

Project Management
of ESG Initiative

ELIGIBILITY

- Public and private companies
- SOEs (BUMN) and non-SOEs
- KADIN members and non-members
- Minimum 100 employees

INVESTMENT

IDR 20,000,000, including:

- Submission for both award categories
- Workshop access
- Awarding Night invitation

JUDGING PANEL



Brigitte Schaden
President of Project Management Austria (PMA) and Chair of the Global Alliance for the Project Professions (GAPPS)



Prof. Dr. Lynn Crawford
Honorary Professor in the School of Project Management at Sydney University and the John Grill Institute for Project Leadership



Tony Simmonds
Director and Chief Executive Officer of Interlink Technology Services Pty Ltd (ITS) and Director for the Global Alliance for Project Performance Standards (GAPPS)



Maria R Nindita Radyati, PhD
Chair of KADIN ESG Governance Committee



Dr. Mulya Amri
Executive Director KADIN Institute



Antonius Sumarwan, PhD
Head of the Master's Program in ESG & Sustainability Management, Sanata Dharma University



Dr. Amalia Yunita, MM-Sust.
Chairman of IATTA - Indonesia Adventure Travel Trade Association

Download RFI

16 Feb - 22 May 2026

Administrative Screening

25 May - 4 Jun 2026

Judging Panel Interview

8 Jun - 12 Jun 2026

Awarding Night

18 Jun 2026

Submit RFI & Payment

16 Feb - 22 May 2026 @ 17:00 GMT+7

Administrative Results

5 Jun 2026

Nomination Results

15 Jun 2026

CONTACT US

+62-8229-700-4147

secretariat@esgprojectmanagement.com



APPLY NOW

www.esgprojectaward.com

Submit your RFI before 22 May 2026



GUIDELINES

tiny.cc/ESGAwardsGuidelines

Access the full participant guidelines



**KADIN INDONESIA
INSTITUTE**



KII Executive Brief

Memahami Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam KUHP Baru: Implikasi bagi Tata Kelola dan Kepatuhan Dunia Usaha

Narasumber :

Dr. Afdhal Mahatta, SH, MH
Tenaga Ahli Komisi III DPR RI/
Dosen Tetap Pascasarjana
Universitas Borobudur

📍 **Ruang Mochtar Riady,
Lantai 29,
Menara Kadin Indonesia**

📅 **Rabu,
8 April
2026**

🕒 **10.00 – 11.30
WIB**

Konfirmasi Kehadiran:

bit.ly/DaftarKIIExecutiveBrief

Khusus Anggota Kadin Indonesia

DISELENGGARAKAN OLEH:



PELAKSANA:



ICEF
INDONESIA CATALOGUE EXPO AND FORUM



**INDONESIA
PROCUREMENT
FORUM & EXPO**

29 - 31 Juli 2026 JIEXPO Kemayoran

**Dari Digitalisasi Menuju Pengadaan Modern:
Transformasi Berbasis Data untuk Indonesia Emas**



HADIRI LAUNCHING

ICEF-IPFE hadir sebagai platform strategis di pasar pengadaan pemerintah serta memperoleh informasi langsung dari LKPP terkait topik pengadaan terkini.

📅 11 Maret 2026 🕒 13:00 WIB

📍 Ruang Roestam Sjarief, lantai 2, Gedung LKPP

TOPIK:

**Seputar Pengadaan dan Potensi untuk
Para Pelaku Usaha**



DIBUKA OLEH:



Anindya N. Bakrie
Ketua Umum Kadin Indonesia



Sarah Sadiqa
Kepala LKPP

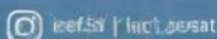


Andi Zabur Rahman
Ketua Umum IAPI

Kontak RSVP Silahkan Hubungi:

Admin Satue
+62 812-8635-1177

Admin 1 DPP IAPI
+62 811 1181 0853



icef54 | info_sesat

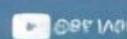


icef54



icef54

www.icef-indonesia.com



ICEF IAPI



info@icef-indonesia.id



APEC BUSINESS TRAVEL CARD (ABTC)

Bisa ke Luar Negeri Tanpa Visa!



ABTC adalah kartu perjalanan pebisnis yang berlaku di negara-negara anggota APEC yang menerapkan skema KPP APEC sebanyak 19 negara anggota, kecuali Amerika Serikat dan Kanada.



APEC BUSINESS TRAVEL CARD (ABTC) berlaku di 19 negara:



Australia



Jepang



Rusia



Brunei
Darussalam



Korea Selatan



Selandia Baru



Cile



Malaysia



Singapura



China



Meksiko



Tailan



Filipina



Papua Nugini



Taiwan



Hong Kong



Peru



Vietnam



Indonesia



Keuntungan Memiliki ABTC:



Bebas visa untuk negara-negara APEC, kecuali Amerika Serikat dan Kanada



Bisa menetap 90 hari per kunjungan



Jalur ekspres VIP di imigrasi bandara



Persyaratan Permohonan Surat Rekomendasi APEC BUSINESS TRAVEL CARD (ABTC)

- 1 Surat permohonan ditujukan kepada Direktur Eksekutif Kadin Indonesia, dilengkapi dengan kop surat perusahaan, data pemohon, tanda tangan pimpinan & stempel Perusahaan
- 2 Scan paspor pemohon masa berlaku min. 2 tahun
- 3 Scan KTA Kadin aktif 2026 (nama dalam KTAB harus sama dengan yang mengajukan)
- 4 Scan NIB perusahaan
- 5 Scan ABTC terakhir (untuk perpanjangan ABTC)/optional



sekretariat@kadinindonesia.id
cc: selly.kadin@gmail.com



<https://trade.layanankadin.id/abtc>



GUNAKAN ATA CARNET UNTUK KEPERLUAN EKSPOR SEMENTARA



APA ITU ATA CARNET?

ATA Carnet adalah sistem dan dokumen untuk kegiatan impor/ekspor sementara yang dapat dipergunakan dalam cakupan wilayah 81 negara.

Carnet merupakan dokumen pabean internasional yang diterima sebagai pemberitahuan pabean dan mencakup jaminan yang berlaku secara internasional.

Secara sederhana, ATA Carnet diistilahkan sebagai **“Paspur untuk Barang”**. Penerapan ATA Carnet dimaksudkan untuk mempermudah dan mempercepat prosedur impor dan ekspor sementara sebagai upaya memfasilitasi dunia bisnis internasional.

PENGGUNA ATA CARNET

Pebisnis

Teknisi

**Penyelenggara
Pameran**

**Profesional,
perorangan/tim**

Kru Film

**Dokter/
Ahli Bedah**

Arsitek

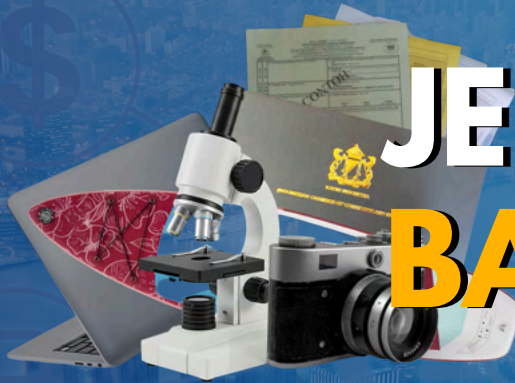
Seniman

Engineer

Peneliti

Tim Olahraga

Grup Musik



JENIS-JENIS BARANG

Penerapan **ATA Carnet** dilakukan setelah Indonesia meratifikasi Konvensi Izin Masuk/Penerimaan Sementara (Convention On Temporary Admission), Istanbul 1990. Barang-barang yang diperbolehkan masuk ke Indonesia dengan menggunakan ATA Carnet diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 228 tahun 2014 mengenai Impor Sementara, yaitu barang-barang untuk tujuan sebagai berikut:

- 1 Untuk keperluan pertunjukan atau digunakan dalam pameran, pekan raya, pertemuan atau kegiatan sejenis
- 2 Untuk peralatan profesional atau tenaga ahli
- 3 Untuk tujuan pendidikan, ilmu pengetahuan, atau kebudayaan
- 4 Untuk keperluan pribadi wisatawan dan/atau barang yang diimpor untuk tujuan olahraga
- 5 Untuk tujuan kemanusiaan

Sementara itu, penggunaan ATA Carnet di negara tujuan selain Indonesia disesuaikan dengan aturan masing-masing negara tersebut mengenai penetapan tujuan barang yang menggunakan ATA Carnet.

PERSYARATAN PENERBITAN ATA CARNET

Salinan (*copy*) identitas diri Pemegang Carnet atau yang mewakili

Surat Kuasa Pemegang Carnet kepada yang mewakili

Salinan (*copy*) Kartu Tanda Keanggotaan Kadin

Salinan (*copy*) NPWP Perusahaan/Perorangan

Salinan (*copy*) SIUP, TDP, dan Domisili Perusahaan

Dokumen Deskripsi Barang, Foto Berwarna, Keterangan dimensi barang, negara pembuat barang dan harga barang

Rencana Perjalanan Barang

Surat Undangan penyelenggaraan dari negara asal

Menandatangani surat pernyataan bermaterai

Meletakkan Jaminan


NEGARA-NEGARA YANG MENERBITKAN DAN MENERIMA **ATA CARNET UNTUK KEPERLUAN EKSPOR DAN IMPOR SEMENTARA:**


1. Afrika Selatan
2. Amerika Serikat
3. Albania
4. Algeria
5. Andora
6. Arab Saudi
7. Australia
8. Austria
9. Bahrain
10. Belanda
11. Belarus
12. Belgia
13. Bosnia Herzegovina
14. Bulgaria
15. Chili
16. China
17. Kroasia
18. Siprus
19. Denmark
20. Estonia
21. Finlandia
22. Filipina
23. Gibraltar
24. Hong Kong
25. Hungaria
26. India
27. Indonesia
28. Inggris
29. Iran
30. Irlandia
31. Islandia
32. Israel
33. Italia
34. Jepang
35. Jerman
36. Kanada
37. Kazakstan
38. Korea Selatan
39. Latvia
40. Libanon
41. Lithuania
42. Luksemburg
43. Makau
44. Madagaskar
45. Malaysia
46. Malta
47. Maroko
48. Mauritius
49. Makedonia Utara
50. Meksiko
51. Moldova
52. Mongolia
53. Montenegro
54. Norwegia
55. Pakistan
56. Pantai Gading
57. Prancis
58. Peru
59. Polandia
60. Portugal
61. Qatar
62. Republik Ceko
63. Rumania
64. Rusia
65. Selandia Baru
66. Senegal
67. Serbia
68. Singapura
69. Slowakia
70. Slowenia
71. Spanyol
72. Sri Lanka
73. Swedia
74. Swis
75. Tailan
76. Tunisia
77. Turki
78. Ukraina
79. Uni Emirat Arab
80. Vietnam
81. Yunani

Dokumen **Ata Carnet** dikeluarkan oleh: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia

Kontak:

Menara Kadin Indonesia Lantai 24, 29
JL. HR Rasuna Said X-5 Kav.2-3
Kuningan, Jakarta

 Telp. (021) 5274484

 atacarnet.idn@kadin.id
atau
atacarnetindonesia@gmail.com

Cantumkan subject email:

- **Pengajuan ATA Carnet** (jika akan mengajukan ATA Carnet)
- **Info ATA Carnet** (jika ingin mendapatkan informasi mengenai ATA Carnet)



Cara Mendaftar Menjadi Anggota Kadin

[Akses Situs Resmi](https://kadin.id/keanggotaan)

<https://kadin.id/keanggotaan>



Kadin.Indonesia.Official



kadin_indonesia



kadinindonesiaofficial



kadinindonesia



Kamar Dagang dan Industri Indonesia



kadin.id

Tata Cara Daftar Menjadi Anggota Kadin

1

Daftar Akun

Buka anggota.kadinindonesia.id

5

Pembayaran

Lakukan pembayaran melalui sistem anggota Kadin

2

Verifikasi Akun

Klik link verifikasi yang dikirimkan ke email anda

6

Validasi Pembayaran

Bagian Keuangan Sekretariat Kadin Indonesia akan memvalidasi pembayaran anda

3

Isi Data Perusahaan/ Asosiasi

Lengkapi informasi perusahaan atau asosiasi anda

7

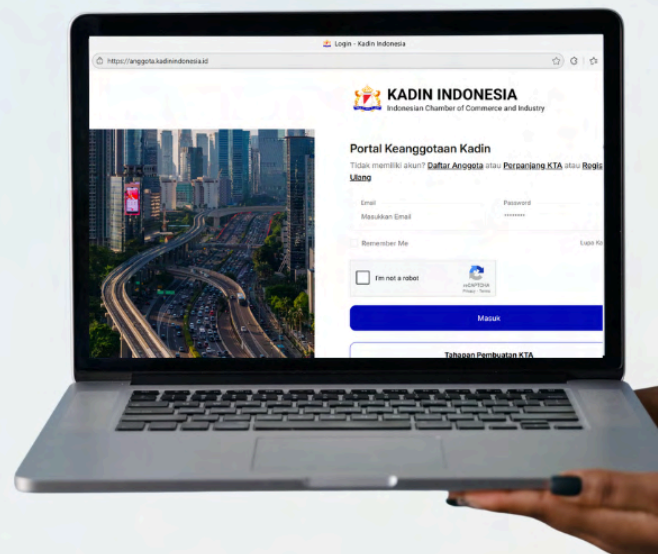
Menjadi Anggota Resmi

Setelah divalidasi, anda resmi menjadi anggota! KTA dan invoice dikirimkan ke email anda

4

Verifikasi oleh Admin

Admin Kadin akan memverifikasi data anda



KTA & SBU

Mengapa harus memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA), Sertifikat Badan Usaha (SBU) Kompetensi, maupun SBU Non-Konstruksi dari Kadin Indonesia?



KTA dan SBU Kadin dapat **meningkatkan kepercayaan** terhadap perusahaan anda

Memiliki KTA menunjukkan bahwa **bisnis anda diakui dan terhubung dengan jaringan bisnis yang kuat**

Kepemilikan KTA Kadin dan SBU dari Kadin **memenuhi kelengkapan prasyarat mengikuti tender pengadaan barang dan jasa**

KTA dan SBU dari Kadin adalah **dokumen penting bagi perusahaan pemasok barang dan jasa untuk pemerintah atau swasta**

KTA dan SBU dari Kadin **menunjukkan standar kualitas, integritas dan kompetensi** yang diperlukan perusahaan untuk melayani pemerintah atau klien swasta



Manfaat Keanggotaan Kadin

Tumbuhkan bisnis melalui network dan kolaborasi

Akses terhadap pasar

Dukungan advokasi

Akses terhadap transformasi digital

Scaling up skill/kemampuan wirausaha dan pekerja

Dukungan dalam penerapan TKDN

Kemudahan pembuatan surat keterangan untuk bisnis

Pendampingan menuju Net Zero

Kesempatan promosi

Update terhadap perkembangan ekonomi dan bisnis

Terlibat dalam penyusunan kebijakan industrial

Potongan harga produk/jasa



Saatnya **Level Up** dan **Maksimalkan Potensi Bisnismu**



Daftar segera menjadi anggota Kadin



anggota@kadinindonesia.id



(+62) 85695410875



kadin.id/keanggotaan

Kadin Indonesia
Menara Kadin Indonesia Lt. 24 dan 29
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav 2-3
Kuningan Timur, Setiabudi
Jakarta Selatan 12950



Kadin.Indonesia.Official



kadin_indonesia



kadinindonesiaofficial



kadinindonesia



Kamar Dagang dan Industri Indonesia



kadin.id



Direktur Eksekutif Kadin Indonesia: Pipin Moh. Saeful Arifin

Penerbit: Kadin Communication Office | **Penanggung Jawab:** Kepala Kantor Komunikasi Kadin Indonesia, Primus Dorimulu | **Redaktur Pelaksana:** Taufik Zulkarnaen

Redaksi: Arita Gloria, Ari Kristiana K, Bagus Dharmawan, Nurdin, Sabrina Hutajulu, Hariwicahyo Utomo, Fery Hasibuan, Luthfiah Ramadhani S

Kadin Indonesia

Menara Kadin Indonesia Lt. 24, 29, Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3,
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950
Telp. 021- 527503 | humas@kadin.id